



**PERATURAN DAERAH
PROPINSSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 – 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan pembangunan selama empat tahun bagi seluruh lembaga/instansi Pemerintah Daerah, Legislatif dan segenap komponen masyarakat yang memuat evaluasi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan indikator kinerja sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas Kepala Daerah selama empat tahun;

b. bahwa Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) memuat program secara terinci dan terukur untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2004;

- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 347 Seri D Nomor 347);
13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349);
14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ((Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 353 Seri D Nomor 353);
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 – 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 – 2004**

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001 – 2004 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh lembaga/instansi Pemerintah Daerah, Legislatif dan segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan empat tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 – 2004 sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan.**
- BAB II Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah.**
- BAB III Program Pembangunan Daerah.**
- BAB IV Penutup.**

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001 – 2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

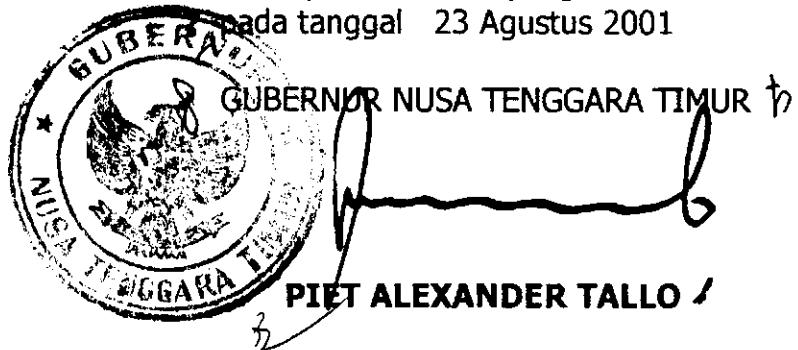
Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001–2004 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Agustus 2001



PIET ALEXANDER TALLO /

Diundangkan di Kupang
pada tanggal



TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR : 181 SERI D NOMOR : 180

Mengacu pada GBHN 1999 – 2004 disamping Pola Dasar Pembangunan Daerah daerah juga berkewajiban menetapkan Program Pembangunan Daerah empat tahun (PROPEDA) dengan pendekatan yang komprehensif dan terfokus meliputi seluruh dimensi/bidang pembangunan. Fokus Propeda diarahkan pada penanganan Isu Daerah yang mendasar yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah. Selain memuat Isu Daerah dalam Propeda juga harus merumuskan skala prioritas penanganan Isu Daerah dengan kebijakan dan alokasi anggaran yang jelas dan terarah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D 5

Cukup Jelas

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	i
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. U M U M.....	1
B. KONDISI DAERAH	2
1. Keadaan Geografis Dan Administratif	2
2. Letak Astronomi, Topografis Dan Geologi/Geomorfologi	3
3. Keadaan Pedologi	4
4. Demografi	4
C. HASIL - HASIL PEMBANGUNAN.....	4
1. Pembangunan Ekonomi Rakyat.....	5
2. Pembangunan Pendidikan Rakyat	9
3. Pembangunan Kesehatan Rakyat.....	9
4. Perkembangan Pembangunan Antar Daerah Kabupaten/ Kota	10
D. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	11
1. Rendahnya Kinerja Perekonomian Rakyat	11
2. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin	12
3. Rendahnya Tingkat Pendidikan Rakyat.....	14
4. Rendahnya Tingkat Kesehatan Rakyat.....	15
5. Partisipasi Masyarakat.....	16
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	17
7. Belum Meratanya Penyebaran Infrastruktur.....	17
8. Pengelolaan Lingkungan Yang Belum Optimal	18
9. Tata Ruang	18

10. Penyelesaian Pengungsi Timor Timur	19
11. Tantangan Globalisasi	19
12. Lemahnya Penegakan Hukum Dan Ham.....	19
E. LANDASAN PROPEDA.....	20
F. SISTIMATIKA PROPEDA	20
 BAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH.....	22
A. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	22
B. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	22
C. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	23
 BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	30
I. PROGRAM POKOK PEMBANGUNAN DAERAH.....	31
A. PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT	31
1. UMUM.....	31
1.1. EKONOMI PRODUKSI	31
1.2. PRASARANA EKONOMI.....	38
a. Pertanahan	38
b. Prasarana Permukiman Wilayah.....	38
c. Prasarana Perhubungan Wilayah.....	39
d. Prasarana Sumber Daya Air Wilayah	41
e. Lingkungan Hidup.....	42
2. ARAH PEMBANGUNAN	45
2.1. EKONOMI PRODUKSI	45
a. Aspek Produksi.....	45
b. Aspek Distribusi (Pasar).....	45
c. Aspek Pembiayaan.....	46
2.2. PRASARANA EKONOMI.....	54

3. PROGRAM PEMBANGUNAN.....	55
 3.1. EKONOMI PRODUKSI	55
1. Program Pengembangan Institusi Kepemilikan Lahan.....	55
2. Program Pengembangan Sarana Permodalan Pedesaan	56
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat.....	57
4. Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	57
5. Program Pengembangan Peternakan.....	59
6. Program Pembangunan Dan Pengembangan Kehutanan.....	60
7. Program Pengembangan Perikanan.....	60
8. Program Peningkatan Perdagangan Produk Unggulan Daerah	61
9. Program Pengembangan Kerjasama Antar Wilayah Dan Peningkatan Promosi Pariwisata	62
10. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Rumah Tangga (IKRT)	63
11. Program Pengembangan Investasi Dan Penguatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	64
12. Program Peningkatan Profesionalitas Dan Kinerja BUMD	64
13. Program Pembangunan Dan Pengembangan Pertambangan	65

3.2. PRASARANA EKONOMI.....	66
1. Program Pengelolaan Pertanahan	66
2. Program Pengembangan Perumahan Rakyat	67
3. Program Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman	67
4. Program Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan..	68
5. Program Peningkatan Fasilitas Dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan Serta Peningkatan Fasilitas Penyeberangan.....	68
6. Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, Keselamatan Pelayaran Dan Peningkatan Sarana Angkutan Laut.....	69
7. Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Udara, Keselamatan Penerbangan Dan Peningkatan Sarana Penerbangan.....	70
8. Program Pengembangan Meteorologi Dan Geofisika	70
9. Program Pengembangan Dan Pengelola-an Jaringan Irigasi.....	71
10. Program Konservasi Pengembangan Dan Pengelolaan Sumberdaya Air	71
11. Program Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	72
12. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah	72
13. Program Pembinaan Dan Pengelolaan Daerah Pesisir Dan Laut	73

14. Program Peningkatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	74
B. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RAKYAT.....	75
1. UMUM.....	75
2. ARAH PEMBANGUNAN	77
3. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RAKYAT.....	78
1. Program Pembangunan Pendidikan Dasar	78
2. Program Pembangunan Pendidikan Menengah (SMU/SMK, MA)	79
3. Program Pembangunan Pendidikan Tinggi	80
4. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah	81
5. Program Revitalisasi Manajemen Pendidikan	82
6. Program Pengembangan, Penyebarluasan Dan Pemanfaatan Iptek	83
C. PEMBANGUNAN KESEHATAN RAKYAT.....	84
1. U M U M	84
2. ARAH PEMBANGUNAN	86
3. PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN.....	87
1. Program Penyediaan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	87
2. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.....	88
3. Program Peningkatan Mutu Layanan Medik	89
4. Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Kesehatan	89
5. Program Penyuluhan Kesehatan Dan Pengembangan Swadaya Masyarakat	90

6. Program Peningkatan Mutu Perencanaan Dan Penganggaran Kesehatan.....	91
II. PROGRAM PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH.....	92
1. UMUM	92
2. ARAH PEMBANGUNAN	95
3. PROGRAM PEMBANGUNAN.....	96
1. TATA RUANG	96
1.1. Program Pembangunan Tata Ruang.....	96
2. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	97
2.1. KEPENDUDUKAN	97
2.1.1. Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluarga.....	97
2.1.2. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan.....	97
2.2. PEMUDA DAN OLAH RAGA	98
2.2.1. Program Pembinaan Dan Keserasian Kepemudaan.....	98
2.2.2. Program Peningkatan Partisipasi Pemuda	98
2.2.3. Program Pengembangan Dan Pem Binaan Keserasian Olaraga	99
2.3 KEBUDAYAAN/KESENIAN	100
2.3.1. Program Pengembangan Kebudayaan/Kesenian.....	100
2.4. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESETARAAN DAN KEADILAN JENDER (KKJ)	101
2.4.1. Program Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan Jender (KKJ).....	101

2.5. KESEJAHTERAAN SOSIAL.....	101
2.5.1. Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.....	101
2.6. TENAGA KERJA	102
2.6.1. Program Pembangunan Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi.....	102
3. PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM	103
3.1. Program Penegakan Hukum Dan HAM	103
4. POLITIK, PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH.....	104
4.1. POLITIK.....	104
4.1.1. Program Pembangunan Politik	104
4.2. PEMBANGUNAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.....	105
4.2.1. Program Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah	105
4.3. PEMBANGUNAN BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK	105
4.3.1. Program Pembangunan Bidang Administrasi Publik.....	105
4.4. OTONOMI DAERAH.....	106
4.4.1. Program Pembangunan Otonomi Daerah	106
4.5. PEMBANGUNAN PERDESAAN.....	106
4.5.1. Program Pembangunan Perdesaan	106
4.6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN	107
4.6.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	107
4.7. PENGEMBANGAN WILAYAH.....	108
4.7.1. Program Pengembangan Wilayah ...	108

5. PEMBANGUNAN AGAMA.....	109
5.1. Program Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Bergama	109
5.2. Program Pembinaan Pendidikan Agama	109
5.3. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.....	110
5.4. Program Pembinaan Kelembagaan Sosial Umat Beragama	110
6. PEMBANGUNAN KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	111
6.1. Program Peningkatan Dan Pemantapan Sistim Keamanan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	111
BAB IV PENUTUP	112

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 9 tahun 2001
Tanggal : 23 Agustus 2001

BAB I

PENDAHULUAN

A. U M U M

Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah ditempatkan dalam dua perspektif, yaitu: pertama, selaras dengan pembangunan nasional; kedua, berbasis pada kepentingan dan potensi daerah atau sumber daya lokal. Karena itu pembangunan daerah bukan replikasi pembangunan nasional atau totalitas pembangunan sektoral, tetapi merupakan rangkaian hubungan fungsional dan sinergis dari berbagai kegiatan bidang-bidang pembangunan yang memanfaatkan secara optimal dukungan nasional dan internasional serta potensi daerah dalam kerangka memperkokoh eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Propeda ini disusun berdasarkan perubahan atau pergeseran paradigma pembangunan, yaitu : dari sentralistik ke desentralistik, dari pemerintah sebagai agen pembangunan ke pemerintah sebagai fasilitator, dari masyarakat sebagai partisipan/kekuatan pendukung kearah masyarakat sebagai subyek dan pemeran yang keseluruhannya berfokus pada manusia dan masyarakat. Proses reposisi dan revitalisasi terhadap semua instrumen pembangunan dalam pemerintahan dan masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan reformasi sehingga pemerintah dan masyarakat (DPRD) telah menjadikannya sebagai suatu tekad untuk menciptakan berbagai alternatif dan mendorong manusia dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan kemampuan daerah dalam mengaktualisasikan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaannya senantiasa

didasarkan pada falsafah "mulailah membangun dari apa yang ada dan yang dimiliki oleh rakyat" melalui pendekatan yang bertumpu pada nilai-nilai moral keagamaan (religius), sosio kultural dan ekosistem.

Dalam rangka mengatur dan mengendalikan proses pembangunan daerah, Pemerintah telah menetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Poldas Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2004. Pengaturan dan pengendalian pembangunan daerah, selanjutnya dijabarkan kedalam Propeda dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPRD Propinsi NTT.

B. KONDISI DAERAH

1. Keadaan Geografis dan administratif

Secara administratif Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 124 kecamatan, 309 kelurahan dan 2.207 desa. NTT adalah propinsi kepulauan dengan luas daratan 47.349.9 Km², luas perairan ± 200.000 Km², terdiri dari 566 pulau besar dan pulau kecil, 42 pulau telah bernama dan 524 pulau belum bernama. Jajaran pulau besar adalah Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor serta gugusan kepulauan Alor, sehingga NTT dikenal juga dengan sebuah akronim Flobamora. Flobamora mempunyai makna yang luas sebagai suatu ungkapan adanya komitmen menyatukan berbagai etnik, kultur, bahasa dan agama yang mencirikan pluralistik masyarakat NTT.

Propinsi NTT terletak di bagian selatan Kepulauan Indonesia memanjang dari arah Barat ke Timur. Bagian Utara dibatasi oleh Laut Flores, Timur dibatasi oleh Eks Timor Timur, Selatan dibatasi oleh Samudera Hindia dan Barat dibatasi oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). NTT mempunyai jarak relatif dekat dengan negara tetangga Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya, sehingga

NTT adalah bagian dari lingkaran Pasifik dan memiliki akses yang besar untuk mengakselerasi era perdagangan bebas yang tergabung dalam APEC.

2. Letak Astronomi, Topografis dan Geologi/Geomorfologi

Letak astronomis kepulauan NTT seluruhnya berada di selatan katulistiwa, pada posisi 8° – 12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur. Jarak Utara-Selatan membentang sepanjang 4° dan jarak Barat-Timur sepanjang 7° , sehingga NTT berada pada zona iklim tropik yang sangat tipikal. Musim kemarau antara 8 – 9 bulan sedangkan penghujan hanya 3 – 4 bulan. Curah hujan berada pada kisaran 800 – 3000 mm/tahun dengan panjang hari hujan rata-rata 100 hari/tahun. Suhu minimum dan maksimum berkisar antara 23 – 34°C.

Topografis NTT berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada lulusan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang pantai atau diapit oleh dataran tinggi atau sistem perbukitan. Sesuai catatan yang ada, lahan dengan kemiringan 15 – 40 persen mencapai luasan 38,07% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai 35,46%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian basah maupun lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah.

Jenis tanah di NTT meliputi jenis tanah meditran seluas 1.110.807 ha (23,45%), Litosol seluas 1.903.184 (40,19%), Alufial seluas 136.250 ha (2,46%), Grumosol seluas 136.750 ha (2,88%) dan Regosol seluas 64.250 ha (1,36%). Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa kedalaman tanah di berbagai daerah relatif tipis yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti struktur batuan induk berupa koral dan tanah yang terbuka karena vegetasi penutup yang, minimum rentan terhadap erosi. Kedalam tanah < 30 cm mencapai luas 1.938.403 ha (40,94%) kedalaman 31-60 cm seluas 1.186.801 ha (25,06%) kedalaman 61-90 cm seluas

199.707 ha (10,55%) dan sisa 995.489 ha (21,03%) merupakan daerah-daerah yang memiliki kedalaman lebih dari 90 cm. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lapisan tanah yang tipis dengan kedalaman kurang dari 30 cm paling luas. Sedangkan lapisan tanah yang tebal dengan kedalaman lebih dari 90 cm berada pada luasan yang sempit.

3. Keadaan Pedologi

Keadaan tanah pada ekosistem lahan kering secara umum mempunyai ciri yang kurang menguntungkan sehingga menjadi faktor pembatas usaha pertanian. Hal ini diindikasikan oleh : (i). Semua orde tanah ini mempunyai tingkat kelembaban yang rendah. (ii). Reaksi tanah netral sampai alkalin, ketersediaan unsur hara mikro rendah. (iii). Tingkat kesuburan tanah yang rendah. (iv). Topografi yang berbukit, mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi.

4. Demografi

Jumlah penduduk NTT tahun 1999 adalah 3.806.664 jiwa yang terdiri dari 1.876.685 laki-laki atau 49,30 persen dan 1.929.979 perempuan atau 50,70 persen. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 761.333 rumah tangga, yang berarti setiap rumah tangga terdiri dari 5 jiwa. Pada tahun 1999 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.853.915 orang atau bertambah sebanyak 81.234 orang dari tahun sebelumnya yang terdistribusi pada sektor primer sebanyak 14.213 orang, pada sektor sekunder sebanyak 42.563 dan pada sektor tersier sebanyak 21.458 orang.

C. HASIL - HASIL PEMBANGUNAN

Arti penting dikemukakannya hasil-hasil pembangunan, baik mengenai keberhasilan maupun kegagalan adalah sebagai dasar perumusan konsep atau perencanaan pembangunan ke arah konsep atau perencanaan pembangunan yang lebih terpadu, terpandu dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan

manusia dan masyarakat NTT dalam kurun waktu tahun 2001-2004.

1. Pembangunan Ekonomi Rakyat

Terdapat beberapa perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat antara lain ditunjukkan oleh adanya Pertumbuhan Ekonomi sebagai suatu kondisi dimana masyarakat menggunakan semua faktor-faktor produksi yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu *output* sehingga masyarakat memperoleh tambahan pendapatan. Pada tahun 1999 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,74% dengan rata-rata tingkat pendapatan perkapita sebesar Rp. 1.397.805,-. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian regional NTT pada tahun 1998 dimana pertumbuhan ekonominya minus 4,99% dengan rata-rata pendapatan perkapita sebesar Rp. 1.207397,-.

Perubahan struktur ekonomi juga memiliki peran penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menggambarkan tentang interaksi antara proses akumulasi atau investasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan perkapita. Hasil interaksi tersebut berpengaruh terhadap perubahan komposisi barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu aktivitas perekonomian. Dalam kurun waktu tahun 1998 sampai tahun 1999, terjadi perubahan struktur ekonomi, yaitu sektor primer sebesar 2,14%, sektor sekunder sebesar minus 0,05% dan sektor tersier sebesar minus 2,09%. Artinya bahwa dalam kurun waktu di atas peran relatif sektor primer dalam pembentukan nilai PDRB masih dominan, sedangkan untuk sektor sekunder dan tersier yang diharapkan lebih besar kontribusinya justru mengalami penurun yang juga relatif kecil.

Di bidang pembangunan ketenagakerjaan, pada tahun 1999 jumlah tenaga kerja sebanyak 2.853.915 orang atau meningkat sebanyak 81.234 orang. Gambaran perkembangan ketenagakerjaan pada periode tahun 1998 sampai

dengan tahun 1999 adalah bahwa terjadi penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor primer yang diindikasikan oleh pergeseran relatif sebesar minus 1,77 %; namun secara absolut terdapat kenaikan tenaga kerja di sektor primer sebesar 14.213 orang. Secara relatif, sektor sekunder dan tersier mengalami pergeseran positif sebesar positif 1,33 % dan positif 0,44%. Demikian pula secara absolut, terjadi penambahan tenaga kerja di sektor tersebut sebesar 42.563 dan 24.458 orang. Secara keseluruhan terjadi penambahan tenaga kerja sebesar 81.234 orang. Kondisi ini menunjukkan kurang signifikan terhadap pemberdayaan tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor sekunder dan tersier.

Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) penunjang keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang ditunjukkan dengan makin meratanya penyebaran infrastruktur pembangunan yang telah sampai ke desa-desa, meningkatnya mobilitas sosial di berbagai daerah. Berbagai perkembangan atau keberhasilan pembangunan prasarana penunjang keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perhubungan darat. Pembangunan perhubungan darat melalui berbagai pendekatan program dan proyek telah dapat mengakses berbagai pusat pemukiman dan pusat produksi. Berdasarkan status jalan, propinsi NTT memiliki jalan nasional sepanjang 1.121,87 km, jalan propinsi sepanjang 2.939,86 km, dan jalan kabupaten sepanjang 12.866,81 km. Kualitas jalan sebagai urat nadi perhubungan berdasarkan permukaan jalan menunjukkan hanya 46,3 % jalan beraspal di Nusa Tenggara Timur, 17,2% jalan kerikil, 35,3 % jalan tanah dan 1,3 % lainnya. Secara umum untuk jalan berstatus jalan Nasional dan jalan Propinsi, Kota Kupang merupakan satu-satunya wilayah yang mempunyai kualitas jalan 100 % aspal dengan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah mencapai 3,511. Itu berarti Kota Kupang dapat dikatakan mempunyai aksesibilitas wilayah yang paling baik

dibandingkan kabupaten lainnya. Sedangkan wilayah lainnya perlu ditingkatkan secara terus menerus.

2. Perhubungan Laut. Wilayah NTT memiliki 22 Pelabuhan Laut yang telah memiliki fasilitas dermaga, dan terdapat 12 Pelabuhan Tradisional yang dikunjungi Kapal Motor, Kapal Perintis dan Perahu Layar namun belum memiliki Fasilitas Pelabuhan. Pelayanan angkutan laut baik angkutan penumpang maupun barang serta hewan dilakukan dengan mengoperasikan beberapa jenis sarana angkutan laut seperti Kapal Expres milik PT. PELNI dan swasta, Kapal Perintis, Kapal Motor, Kapal Layar Motor dan Perahu Layar. Saat ini kapal expres milik PT. PELNI yang menyinggahi pelabuhan terdapat 4 (empat) unit kapal, sedangkan terdapat 3 (tiga) unit Kapal Perintis menyinggahi 18 (delapan belas) Pelabuhan. Pola jaringan transportasi yang ada saat ini masih didasarkan pada kebutuhan mendasar masyarakat berupa pemberian pelayanan jasa transportasi pada daerah terpencil, pulau-pulau pada daerah perbatasan, pesisir pantai serta pemberian layanan berupa peningkatan tingkat keamanan dari segi kecelakaan khususnya angkutan laut.
3. Perhubungan Udara. Di NTT terdapat 14 Bandara, dengan melayani 13 trayek domestik dan 1 trayek internasional (Kupang - Darwin). Dari 14 Bandara tersebut terdapat beberapa Bandara yang relatif jarang didarati, sedangkan lainnya tetap dilayani walaupun dengan frekwensi terbatas, hal tersebut disebabkan karena semakin lancarnya lalu lintas angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan.
4. Pos, Telekomunikasi dan Geofisika. Perkembangan sarana pos yang ada dan tersebar diseluruh daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah : Kantor Pos : 126 Unit, Pos bergerak : 46 Unit, Unit Pelayanan Pos 47 Unit dan fasilitas Pos lainnya : 2.306 Unit. Sedangkan

jaringan fasilitas telepon yang sudah menjangkau 124 Kecamatan yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 56 Kecamatan atau prosentase fisik penyebarannya sebesar 48,9 %. Prasarana dan sarana meteorologi dan geofisika di wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari 9 Stasiun Meteorologi, 2 Stasiun Geofisika dan 1 Stasiun Klimatologi.

5. Pembangunan infrastruktur lain yang mendukung pencapaian produktivitas masyarakat, seperti pembangunan daerah Irigasi mencapai 1.403 buah dengan kemampuan potensial 213.814 ha dan kemampuan fungsional 90.896 Ha dengan rincian sesuai jenis irigasi sebagai berikut: (a) Irigasi teknis tersebar di 25 Daerah Irigasi dengan kemampuan potensial 35.643 Ha dan kemampuan Fungsional 11.718 Ha; (b) Irigasi semi teknis tersebar di 133 Daerah Irigasi dengan kemampuan potensial 57.511 Ha dan kemampuan Fungsional 25.754 Ha; dan (c) Irigasi sederhana tersebar di 1.245 Daerah Irigasi dengan kemampuan potensial 120.687 Ha dan kemampuan Fungsional 53.424 Ha.
6. Disamping irigasi tersebut di atas, pelayanan sumber daya air juga dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: (i) Proyek irigasi desa (PID) yang kemampuan fungsionalnya saat ini baru mencapai 52.386 Ha dari potensi 90.436 Ha; (ii) Embung Irigasi 19 buah dengan luas potensial 4.146 Ha. dan embung kecil 281 buah; (iii) Jaringan Irigasi Air Tanah 325 daerah irigasi dengan luas areal 1.364 Ha; (iv) Sumur bor yang dimanfaatkan untuk irigasi ada 380 buah dengan JIAT 2.589 Ha.
7. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan irigasi, telah dilakukan pembinaan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A): 450 P3A Irigasi, 40 P3A Gabungan, 360 P3A JIAT, 21 P3A Embung Irigasi, dan 279 P3A embung kecil. Sesuai perkembangan P3A, menunjukkan kecenderungan

yang makin baik yang ditandai dengan adanya penetapan kelompok secara formal oleh Bupati pada masing-masing kabupaten.

2. Pembangunan Pendidikan Rakyat

Pembangunan pendidikan juga telah menunjukkan berbagai kemajuan. Perkembangan pembangunan pendidikan pada tahun 1999 dapat digambarkan bahwa: (a). Penduduk yang tamat SD dan tidak tamat SD sebesar 75,21%, (b). Tamat SLTP 7,56% dan tamat SLTA 2,72%, (c). Rata-rata NEM lulusan SD 5 – 6, lulusan SLTP 5,25 – 5,80, lulusan SMU 5,38 dan lulusan SMK 5,47, (d). Angka partisipasi murni SD/MI sebesar 10,61% dan angka transisi SD/MI sebesar 61,34%, (e). Angka putus sekolah SD 3,83% dan SLTP 4,11%. (f). Angkat partisipasi murni SLTP sebesar 45,01%.

Pada dasarnya permasalahan guru di Nusa Tenggara Timur berkisar pada jumlah yang tidak mencukupi untuk daerah-daerah pedalaman, mutu dan kualifikasi guru yang relatif tidak berkelayakan serta persebaran guru yang tidak merata serta lebih banyak terkonsentrasi di kota dari pada di pedesaan.

3. Pembangunan Kesehatan Rakyat

Perkembangan pembangunan Kesehatan dapat digambarkan bahwa pada tahun 1999 telah dicapai : (a). Angka kematian kasar (AKK) sebesar 8,4 per 1.000 penduduk, (b). Angka kematian ibu melahirkan (AKI) sebesar 860 per 100.000 kelahiran hidup, (c). Angka kematian bayi (AKB) 48 per 1.000 kelahiran. (d). Angka kematian Balita (AKBal) sebesar 82 per 1.000 Balita. (e). Angka kesakitan malaria sebesar 165,5 per 1.000 penduduk, (f). Angka kesakitan TBC sebesar 1,2 per 1.000 penduduk, (g) Angka gizi buruk sebesar 3,8%. (h) Jumlah dokter di rumah sakit 64 orang, di Puskesmas 96 orang, dokter spesialis 41 orang dan jumlah dokter gigi sebanyak 50 orang.

Pada tahun 1999, kondisi pembangunan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan ratio dokter terhadap 100.000 penduduk sebesar 1 : 7,12, jangkauan layanan puskesmas/pustu terhadap masyarakat belum merata, karena persebaran puskesmas/pustu rata-rata masih terbatas yaitu 1 puskemas/pustu melayani 2 kecamatan.

Perkembangan pembangunan lainnya juga telah menunjukkan berbagai kemajuan dan keberhasilan. Kondisi ini dipengaruhi secara timbal balik oleh pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta berbagai bidang pembangunan lainnya. Dengan kata lain perkembangan pembangunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat tidak saling meniadakan tetapi justru saling melengkapi, mendukung dan menguntungkan. Perkembangan bidang pembangunan lainnya seperti: tata ruang, hukum dan HAM, pemerintahan, politik, pemerintahan dan otonomi daerah, agama, kesejahteraan sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta bidang-bidang pembangunan lainnya telah menunjukkan berbagai kemajuan yang secara keseluruhan telah mempengaruhi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

4. Perkembangan Pembangunan Lintas Daerah Kota/Kabupaten

Pembangunan daerah diarahkan untuk menyerasi laju pertumbuhan antar daerah, antara kota dan perdesaan serta membuka daerah yang terisolasi. Dari hasil evaluasi pembangunan ternyata masih terdapat kesenjangan pembangunan antar daerah yang merupakan salah satu tantangan dalam mencapai pembangunan yang adil dan merata di seluruh propinsi. Terdapat kecenderungan perkembangan pembangunan di kota lebih cepat dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Pertambahan penduduk di daerah perkotaan membawa dampak pada sarana pelayanan publik, antara lain air bersih dan listrik. Sampai dengan tahun 1998, penduduk Nusa Tenggara Timur yang mendapat pelayanan air bersih dari PDAM di

daerah perkotaan mencapai 77,01%, sedangkan di daerah perdesaan 22,99%. Fasilitas lainnya yang berkembang sesuai dengan kebutuhan pelayanan bagi penduduk adalah fasilitas listrik. Pada tahun 1996, penduduk yang menikmati fasilitas listrik sebanyak 25,8% meningkat menjadi 32,6% pada tahun 1998 yang sebagian besar dinikmati rumah tangga perkotaan. Berdasarkan indikator tersebut di atas, maka dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan perlu dilakukan percepatan yang lebih signifikan dalam pembangunan di daerah perdesaan.

D. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pokok pembangunan di daerah NTT adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nusa Tenggara Timur terutama dalam menghadapi era globalisasi. Kondisi tersebut sebagai akumulasi permasalahan pembangunan sebagai berikut :

1. Rendahnya Kinerja Perekonomian Rakyat.

Rendahnya kinerja perekonomian rakyat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: *Pertama*, belum meratanya kepemilikan faktor-faktor produksi dan tingkat pemanfaatannya pun belum optimal. Terdiri dari : a). Rendahnya rasio penduduk usia produktif terhadap kepemilikan lahan usaha, b). Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang kemaslahatan ekonomis dari tabungan dan pemanfaatan tabungan oleh masyarakat untuk membiayai berbagai kegiatan atau usaha ekonomi produktif melalui fasilitas kredit usaha masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan formalisitis lembaga keuangan, c). Kendatipun secara kuantitas NTT memiliki angkatan kerja yang besar, namun pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang transformasi teknologi dan pemanfaatannya belum optimal, sehingga proses kemitraan yang terjadi adalah perusahaan harus menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan tenaga kerja yang ada, d). Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dapat mendorong peningkatan pengetahuan

tenaga kerja khususnya tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga terjadi pemborosan (*inefisiensi*) dalam penggunaan biaya input bagi pengembangan produksi perluasan, e). Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, e). Terbatasnya tingkat perolehan kesempatan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan masih terbatas atau timpang.

Kedua, terbatasnya jaring pemasaran (*outlet*) baik secara personal maupun secara melembaga atas produk-produk yang dihasilkan masyarakat, sehingga kurang dapat mendorong daya pikir dan daya kerja masyarakat. Penyebabnya adalah: a). Belum meratanya informasi tentang daya saing produk sesuai permintaan pasar, b). Pengembangan usaha dari kelembagaan ekonomi seperti usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM) masih terfokus pada kegiatan produksi dan kurang memperhitungkan aspek penciptaan segmen pasar baru dan skala usaha. *Ketiga*, kurang tersedianya sarana teknologi dan terbatasnya jaring teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu penggerak peningkatan produksi dan produktivitas. Salah satu penyebabnya adalah: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan teknologi terapan. *Keempat*, terbatasnya jaring kemitraan antara pengusaha dalam daerah dan pengusaha luar daerah. *Kelima*, terbatasnya investasi/permodalan sebagai sumber pembiayaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.

2. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin.

Terdapat 2 (dua) cara pandang tentang kemiskinan, yaitu : menurut BPS dan menurut indikator BKKBN. Menurut BPS, pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.606.600 jiwa atau sebanyak 321.320 KK atau sebesar 42,20 persen dari jumlah penduduk. Menurut indikator BKKBN, pada tahun 1999, jumlah KK di NTT (terdata) sebanyak 804.399 KK. Dari jumlah tersebut masih terdapat 550.146 KK miskin atau sebanyak 2.525.730 orang

atau 69,99 persen (Keluarga pra sejahtera + Keluarga sejahtera I).

Beberapa ukuran kemiskinan menurut BPS adalah: Kemampuan membeli bahan makanan dan minuman sebanyak 2.100 gram kalori yang bersumber dari sekitar 52 komoditi. Garis kemiskinan pada tahun 1999 mencapai 84.855 Rupiah, sedangkan untuk daerah desa mencapai 65.526 Rupiah. Menurut indikator BKKBN, yang termasuk miskin adalah: (a). Tidak dapat makan 2 kali sehari atau lebih, (b). Tidak bisa menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk paling kurang sekali dalam seminggu, (c). Tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk setiap aktivitas. Yang termasuk miskin sekali adalah disamping indikator di atas, terdapat beberapa indikator lain yaitu: (d). Tidak dapat memperoleh pakaian baru minimal 1 stel dalam waktu 1 tahun terakhir, (e). Bagian terluas lantai rumah dari tanah, (f). Luas lantai rumah kurang dari 8 m^2 per penghuni rumah. Indikator pendukung lainnya adalah : (g). Tidak ada anggota keluarga berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai penghasilan tetap, (h). Bila anak sakit atau ingin mengikuti keluarga berencana tidak dapat memfasilitasi kesehatan, (i). Anak berusia 7 – 15 tahun tidak dapat bersekolah.

Disamping indikator atau ukuran kemiskinan menurut BPS dan BKKBN di atas, realitas kemiskinan sebagai permasalahan bersama antara pemerintah dan masyarakat dapat dipandang bahwa dari berbagai aspek kehidupan. Elaborasi faktor penyebab tersebut adalah: *Pertama*, rendahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini diindikasikan oleh: a). Kemampuan (pendapatan) masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu, b). Harga barang atau jasa tertentu, c). Selera konsumen atas suatu barang atau jasa tertentu. *Kedua*, tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kualitas hidup yang relatif masih rendah. Kondisi ini diindikasikan oleh: a). Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama di pedesaan tentang paradigma hidup sehat, b). Rendahnya kualitas lingkungan, c). Memburuknya status gizi khususnya pada kelompok

penduduk usia di bawah lima tahun sehingga dapat menurunkan kualitas fisik dan intelektual, d). kondisi alam yang kurang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat, *Ketiga*, masih kentalnya nilai-nilai tradisional sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat yang lebih berorientasi pada pola hidup konsumtif. *Keempat*, lambatnya pemulihan ekonomi. Kondisi ini diindikasikan oleh: a). Kurangnya investasi swasta sehingga mengakibatkan masih terbatasnya kesempatan kerja, masih tingginya jumlah pengangguran, b). Meningkatnya jumlah *drop out* pada berbagai tingkat pendidikan, c). Kurang diperhatikannya hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), d). Masih banyaknya penduduk (116.628 orang) yang memilih hidup/tinggal di dalam kawasan hutan lindung.

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan Rakyat.

Permasalahan rendahnya tingkat pendidikan rakyat tercermin dari tingkat pendidikan rakyat atau penduduk usia sekolah yang tidak atau belum pernah bersekolah sebesar 376.170. Diketahui pula bahwa penduduk yang tidak atau belum tamat sekolah dasar sebesar 989.890 orang. Sedangkan yang berpendidikan sekolah dasar sebesar 880.890 orang. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Nusa Tenggara Timur masih sangat rendah sehingga penanganan permasalahan pendidikan menjadi permasalahan yang menonjol di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Masalah kedua adalah mutu pendidikan yang rendah. Selama lima tahun terakhir, sebagai contoh NEM rata-rata SD hanya mencapai 5,00-6,00, SLTP 5,52-5,80. Pada tahun 1999, NEM rata-rata SMU/SMK di Nusa Tenggara Timur hanya mencapai 5,38 (SMU) dan 5,47 (SMK). Disamping itu, jenis pendidikan belum sesuai dengan peta kebutuhan daerah (relevansi sekolah) dimana sekolah-sekolah kejuruan masih belum memadai keberadaannya baik jumlah maupun kualitasnya. Disamping itu, masalah kesempatan belajar juga terbatas. Angka partisipasi murni

menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 10,61% anak usia sekolah dasar yang belum mengenyam sekolah dasar karena angka transisi SD/MI sebesar 61,34%. Angka itu akan semakin besar bila ditambah dengan angka putus sekolah yang mencapai 3,83%. Sementara itu, angka partisipasi murni SLTP hanya mencapai 45,01% selain angka putus sekolah yang mencapai 4,11%. Masih timpangnya ratio jumlah sekolah dan guru antara daerah yang satu dengan daerah lainnya terutama antara perkotaan dan pedesaan serta kualifikasi guru yang layak belum memadai sesuai kebutuhan.

4. Rendahnya Tingkat Kesehatan Rakyat.

Permasalahan pembangunan kesehatan di NTT adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Kondisi ini dicirikan oleh: tingginya angka kematian kasar (AKK), angka kematian ibu (AKI), angka kematian balita (AkBal) dan angka kematian bayi (AKB). AKK Nusa Tenggara Timur pada tahun 1998 sebesar 8,7% per 1.000 kelahiran, lebih tinggi dari AKK nasional sebesar 7,5% per 1.000 kelahiran. Sementara AKB sebesar 48 per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 41 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Nusa Tenggara Timur adalah 860 per 100.000 kelahiran hidup, hampir tiga kali lipat dari angka nasional yang mencapai 373 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AkBal di Nusa Tenggara Timur mencapai 82 per 1.000 balita dan angka nasional mencapai sebesar 81 per 1.000 balita.

Rata-rata jumlah hari sakit mendekati 100 hari per orang dan penyakit yang diderita lebih banyak bersifat laten yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas masyarakat. Disamping itu, beberapa permasalahan lainnya adalah: (a). masih terbatasnya fasilitas kesehatan rumah sakit, (b). Menurunnya kualitas layanan rumah sakit, (c). Meningkatnya pertambahan penduduk yang belum diikuti dengan ketersediaan layanan tempat tidur di rumah sakit dari 46,9 tempat tidur per 100.000 orang

menjadi 43,2 tempat tidur per 100.000 orang, (d). Kurang seimbangnya rasio dokter, para medis, juru rawat, jumlah sarana dan prasarana kesehatan terdahap jumlah masyarakat, luasnya jangkauan layanan kesehatan. (e). Pada tahun 1999 telah dicapai Usia Harapan Hidup (UHH) laki-laki 62,86 tahun dan perempuan 65,06 tahun.

Permasalahan pembangunan kesehatan di NTT tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor kesehatan, tetapi disebabkan juga oleh faktor-faktor lain seperti: (a). Permasalahan kemiskinan sebagaimana telah diterangkan di atas, (b). Krisis ekonomi yang mempengaruhi menurunnya alokasi anggaran bidang pembangunan kesehatan, (c). Daya beli masyarakat yang cenderung menurun termasuk kemampuan untuk membeli jasa layanan kesehatan, (d). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, (e). Tingkat kesulitan geografis dan topografis NTT dengan tingkat kemiringan yang tinggi, sehingga menyulitkan jangkauan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, jumlah tenaga medis seperti dokter dan tenaga non medis masih kurang.

5. Partisipasi Masyarakat.

Salah satu permasalahan pembangunan di daerah NTT adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Hal ini terlihat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, dimana peran masyarakat masih relatif rendah. Kurang terlibatnya masyarakat dalam proses pembangunan berakibat pada sikap dan perilaku masyarakat yang kurang menguntungkan bagi proses pelaksanaan pembangunan daerah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat nampak pula pada lemahnya sikap proaktif dan kreativitas masyarakat. Hal ini menggambarkan masih kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan (tri daya) yang sesungguhnya perlu segera ditingkatkan agar kinerja pembangunan daerah dapat ditingkatkan. Faktor

penyebabnya permasalahan diatas antara lain: (a). Belum luasnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan inisiatif, kreativitas dan sikap mandiri berkenaan dengan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas pembangunan, (b). Belum terdorongnya masyarakat untuk menerima inovasi pembangunan.

6. Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Salah satu permasalahan otonomi daerah adalah berkenaan dengan cara pandang tentang urgensi pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Pada dasarnya otonomi daerah memiliki 3 aspek yaitu: aspek personalia, aspek pembiayaan dan aspek prasarana sehingga mampu mendorong kreativitas, pelayanan prima dan demokratisasi pengelolaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Cara pandang yang masih bersifat parsial telah mengakibatkan adanya ketimpangan koordinasi pelaksanaan ketiga aspek di atas sehingga pelaksanaan otonomi daerah menjadi sempit dan kurang bermakna. Kondisi ini telah mempengaruhi kemauan baik pemerintah untuk secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ke depan akan mempengaruhi kemauan baik pemerintahan reformasi untuk mengurangi, memberantas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana yang antara lain disyaratkan *clean goverment* dan *good governance*.

7. Belum Meratanya Penyebaran Infrastruktur.

Infrastruktur pembangunan merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan pada umumnya. Kondisi pembangunan infrastruktur yang secara kualitas dan kuantitas dirasakan belum cukup untuk menunjang terlaksananya pembangunan sebagaimana diharapkan, telah menjadi prioritas perhatian pemerintah. Ketersediaan infrastruktur pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial serta bidang pembangunan lainnya seperti: air bersih, lingkungan

perumahan yang bersih, sekolah, rumah sakit, puskesmas/pustu, pasar, alat transportasi, prasarana jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan udara, rumah ibadah, kelembagaan ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan lainnya yang masih kurang dan belum merata persebarannya atau masih terkonsentrasi pada daerah-daerah perkotaan telah mengakibatkan kurangnya minat investasi khususnya investasi swasta dalam mengelola berbagai ketersediaan sumber daya alam yang ada pada kawasan-kawasan pengembangan di NTT.

8. Pengelolaan Lingkungan Yang Belum Optimal.

Perspektif lingkungan pembangunan terdiri dari: (a). Lingkungan sosial, (b). Lingkungan buatan, (c). Lingkungan alam. Lingkungan sosial berhubungan dengan perilaku, pola tindak, sikap mental masyarakat. Lingkungan buatan berhubungan dengan berbagai kegiatan atau perbuatan manusia untuk mengubah sesuatu yang belum dan kurang menjadi sesuatu yang ada dan lebih. Lingkungan alam berhubungan dengan anugerah yang diterima oleh manusia dan masyarakat melalui alam atau sumber daya alam.

Belum optimalnya pengelolaan berbagai lingkungan yang ada disebabkan oleh faktor tingginya lahan kritis dan tingginya frekuensi timbulnya ancaman bahaya kekeringan akibat kondisi alam/iklim. Kondisi tersebut mendorong adanya penurunan keanekaragaman hayati. Penyebab lain adalah rendahnya tingkat diversifikasi energi sehingga menekan kondisi lingkungan, adanya potensi rawan bencana seperti bencana alam, penyakit dan belum terbinanya sikap solidaritas, sikap alkulturasi dan inkulturası serta kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai inovasi, modernitas atau nilai-nilai universal lainnya bagi suatu kehidupan yang ideal.

9. Tata Ruang.

Implementasi tata ruang yang tidak konsisten sesuai peruntukannya telah

menimbulkan berbagai permasalahan penataan ruang. Faktor penyebabnya antara lain: (a). Masih rendahnya pemahaman fungsi tata ruang, (b). Rendahnya aspek penegakkan hukum (*law enforcement*), (c). Masih rendahnya tingkat kualitas produk tata ruang akibat kurang mampunya tata ruang tersebut beradaptasi dengan dinamika pembangunan, (d). Adanya permasalahan atau konflik tanah.

10. Penyelesaian Pengungsi Timor Timur.

Besarnya jumlah pengungsi dibandingkan daya tampung dan kemampuan daerah telah berpengaruh nyata terhadap kinerja pembangunan daerah, baik menyangkut keamanan, pelayanan sosial ekonomi dan psikologis masyarakat terutama berkaitan dengan isu-isu kerusuhan, sanksi PBB dan lainnya.

11. Tantangan Globalisasi.

Globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang antara lain meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial budaya. Berdasarkan kondisi ini diperlukan persiapan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan memilih dampak globalisasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

12. Lemahnya Penegakkan Hukum dan HAM.

Lemahnya penegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM) secara konsisten dan konsekuensi antara lain disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif baik yang berhubungan dengan materi, perangkat dan kelembagaan hukum. Intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda) dan peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparatur penegak hukum, kesadaran, mutu pelayanan publik di bidang hukum kepada

masyarakat. Akibat kepastian hukum dan jaminan hukum tidak tercipta yang akhirnya melemahkan penegakkan supremasi hukum, semakin meluasnya praktik KKN, semakin sulit mencari kebenaran dan keadilan.

Tekad untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan pada kenyataan belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah termasuk aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Adanya intervensi dan atau pengaruh pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, semakin melemahkan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kondisi demikian mengakibatkan penegakkan dan perlindungan hukum serta penghormatan HAM masih memprihatinkan yang tercermin dari terjadinya berbagai pelanggaran HAM.

E. LANDASAN PROPEDA

1. Landasan idil adalah Pancasila.
2. Landasan konstitusional adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
3. Landasan operasional GBHN 1999-2004 dan Pola Dasar Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 – 2004.

F. SISTIMATIKAN PROPEDA

Sistematika Propeda adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Kondisi Daerah
- C. Hasil-Hasil Pembangunan
- D. Permasalahan Pembangunan Daerah
- E. Landasan Propeda
- F. Sistematika Propeda

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Tujuan Pembangunan Daerah
- B. Sasaran Pembangunan Daerah
- C. Strategi Pembangunan Daerah

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Program Pokok Pembangunan Daerah
 - 1. Pembangunan Ekonomi Rakyat
 - 1.1. Pembangunan Ekonomi Produksi
 - 1.2. Pembangunan Prasarana Ekonomi
 - 2. Pembangunan Pendidikan Rakyat
 - 3. Pembangunan Kesehatan Rakyat
- B. Program Penunjang Pembangunan Daerah
 - 1. Penataan Ruang
 - 2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial
 - 3. Pembangunan Hukum Dan HAM
 - 4. Pembangunan Politik, Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
 - 5. Pembangunan Agama
 - 6. Pembangunan Keamanan, Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat

BAB IV PENUTUP

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN DAERAH

A. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Wujud pelaksanaannya tercermin dalam indikator manusia yang mempunyai usia harapan hidupnya panjang dengan tingkat kesehatan yang tinggi, mempunyai pengetahuan dengan kemampuan menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan IPTEK yang berdasarkan nilai-nilai etik dan moral serta mempunyai standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan perkapita rii masyarakat (daya beli).

B. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum di dalam POLDAS pembangunan daerah, maka pada dasarnya sasaran pembangunan daerah, adalah :

1. Meningkatnya kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui optimalisasi pelaksanaan pembangunan ekonomi rakyat, pendidikan rakyat dan kesehatan rakyat. Gambaran manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mandiri adalah suatu kondisi dimana terdapat kemampuan masyarakat untuk merumuskan berbagai alternatif dan tindakan konkret untuk pemecahan masalah; manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maju adalah suatu kondisi dimana terjadi perubahan yang nyata dari pola pikir dan tindakan yang berorientasi tradisional (tertutup) ke pola pikir dan tindakan yang berbasis ilmu pengentahuan dan teknologi; sedangkan manusia dan masyarakat Nusa

Tenggara Timur yang sejahtera adalah suatu kondisi dimana manusia dan masyarakat mempunyai keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak dasar atau kebutuhan lahir dan batin secara adil dan merata.

2. Terjaminnya penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran yang didukung oleh aparatur yang jujur, profesional berwibawa dan tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai.
3. Mantapnya otonomi daerah dan terjaminnya kedaulatan, persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Meningkatnya mutu aparatur dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
6. Meningkatnya kerja sama regional dan internasional dalam cakrawala politik luar negeri yang berdaulat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional.
7. Terwujudnya keseimbangan yang dinamis antara pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukungnya.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan pola pendekatan kesisteman yang lebih memperhatikan hubungan integral dari berbagai variabel pembangunan daerah, maka untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan Strategi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yaitu "Pertumbuhan Melalui Pemerataan" dengan prinsip Membangun Dari Apa Yang Dimiliki Rakyat dan Apa Yang Ada Pada Rakyat, melalui : a). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dititikberatkan pada Pembangunan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

Rakyat, b). Penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya pada lingkup pemerintah dan masyarakat, c). Pengalokasian sumber daya secara prorsional dan bertanggungjawab. Pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan rakyat dilaksanakan secara bertahap melalui tahap pemulihan, pemantapan, dan pengembangan.

Pertumbuhan melalui pemerataan mengandung pengertian bahwa pada tingkat awal aspek pemerataan di berbagai bidang kehidupan manusia dan masyarakat NTT harus menjadi prioritas, sehingga dapat menciptakan proses penggandaan yang selanjutnya akan mendorong terjadinya pertumbuhan sebagai prasyarat kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini berarti bahwa apabila setiap anggota kelompok masyarakat memiliki faktor-faktor produksi secara merata dan adil dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai proses pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan yang sama dalam pemanfaatan berbagai hasil pembangunan, maka secara alamiah masyarakat akan memberdayakan diri sendiri, kelompok dan lingkungannya. Asumsi ini, menggambarkan tentang adanya saling keterkaitan, saling mendukung saling meneguhkan, sehingga dapat mendorong adanya suatu daya ungkit, daya fikir dan daya kerja yang kuat dari manusia dan masyarakat NTT untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan, memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pengertian pemerataan sebagaimana dimaksud di atas akan tergambar dari :

- a). Adanya peningkatan nilai tambah terhadap manusia, masyarakat (rumah tangga) sebagai pemilik faktor-faktor produksi, b). Menguatnya posisi jual/tawar faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga kondisi sosial dan budaya, ekonomi masyarakat meningkat, c). Meningkatnya pengetahuan dan pemanfaatan IPTEK sehingga dapat mengurangi inefisiensi produksi, d).

Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan dan kepastian hukum.

Pertumbuhan mengandung pengertian bahwa apabila aspek-aspek pemerataan sebagaimana dikemukakan di atas telah optimum, maka secara simultan akan mendorong kenaikan *output* produksi dan produktivitas sehingga manusia dan masyarakat akan memperoleh tambahan pendapatan yang akan meningkatkan daya belinya, adanya perbaikan kesehatan dan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mempergunakan atau memanfaatkan teknologi.

Uraian singkat tentang strategi pembangunan daerah di atas, menunjukkan bahwa kendatipun aspek pemerataan merupakan hal pertama yang harus dilakukan dan selanjutnya diikuti oleh aspek-aspek pertumbuhan, namun keduanya tidak dapat berdiri sendiri atau dengan kata lain harus dilakukan secara simultan. Oleh karena itu, maka semua pelaku pembangunan sebagaimana diuraikan berikut ini perlu memahami dengan sebenar-benarnya, sehingga tidak terjadi salah urus dalam keseluruhan manajemen pembangunan daerah yang terdiri dari para pemeran pembangunan yaitu :

Masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan yang optimal maka masyarakat perlu lebih berpartisipasi, proaktif sejak tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta bertanggungjawab dalam mengelola aset-aset pembangunan untuk lebih produktif.

Pemerintah. Di dalam proses kemitraan, peran Pemerintah selain dari sisi pengalokasian dana, juga berperan sebagai fasilitator bagi tumbuhnya iklim kondusif. Peran pemerintah sebagai fasilitator didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance dan clean government*, yaitu : partisipatif, penegakkan hukum, terbuka, bertanggungjawab, memihak pada rakyat atas kesepakatan bersama,

mengutamakan pemerataan, efektif dan efisien,

Dunia Usaha. Kegiatan pembangunan membutuhkan peran swasta/dunia usaha sebagai investor atau penyedia modal dalam pembangunan dengan memanfaakan sumberdaya daerah dalam berbagai skala usaha.

Perguruan Tinggi. Kelemahan sumber daya manusia dan paket-paket teknologi membutuhkan peran Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi diperlukan sebagai penggerak, pengagas di daerah diharapkan mampu berperan sebagai kelompok pemikir alternatif khususnya dalam hal perbaikan dan penciptaan teknologi produksi sehingga semua aktivitas pembangunan semakin efisien dan efektif.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM telah memiliki sejarah panjang dalam melakukan advokasi bagi kepentingan masyarakat. Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan dari semula dikelola sepenuhnya oleh pemerintah (agen pembangunan) dan masyarakat menjadi pertisipan, menjadi masyarakat sebagai subyek atau pemeran pembangunan.

Lembaga Keagamaan. Lembaga Keagamaan dan tokoh-tokoh agama, masyarakat, adat tentunya sangat berperan dalam memberikan makna religius dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial dan politik sekaligus menjadi alat pembinaan dan pengawasan secara moral dan etika terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah di atas, maka diperlukan langkah-langkah kerja yang bersifat *workable*, sehingga tidak terjadi salah tafsir, salah urus, salah sasaran dan salah pertanggungjawaban. Langkah langkah kerja tersebut adalah :

Pertama; langkah-langkah strategis jangka pendek dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi melalui kegiatan ekonomi yang cepat menghasilkan (*quick yielding*), antara lain meliputi upaya untuk mempertahankan

stabilitas ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan pemilikan faktor-faktor produksi (sumber daya), ketahanan pangan, dan mempercepat realokasi sumberdaya pembangunan untuk meningkatkan produksi yang berbasis sumberdaya lokal.

Kedua; langkah-langkah jangka menengah yang disamping perlu untuk menunjang pemulihan ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui penanggulangan kemiskinan, perberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi, pengembangan kemitraan usaha antara golongan ekonomi kuat dengan UKM, pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kemampuan IPTEK, penguatan institusi pasar, penguatan sistem ketahanan pangan, pembangunan industri pengolahan berdasarkan keunggulan kompetitif.

Ketiga; pengembangan sarana dan prasarana pembangunan yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang meliputi peningkatan fungsi pelayanan prasarana, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi bidang prasarana, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan prasarana, serta meningkatkan peranserta swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana.

Keempat; pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan kebijakan strategis berupa penerapan prinsip berkelanjutan dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian, peningkatan potensi sumberdaya alam fungsi lingkungan hidup, serta pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan teknologi ramah lingkungan.

Kelima; dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, diperlukan penguatan dimensi keuangan daerah melalui pengembangan sektor riel, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi dalam rangka perluasan basis pajak

(*tax base*) dan intensifikasi serta reformasi sistem perpajakan.

Keenam; perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang adil dan merata serta semakin bermutu bagi seluruh rakyat, terutama pendidikan di luar sekolah, penuntasan wajib belajar 9 tahun, pembaharuan sistem pendidikan terutama kurikulum pendidikan dengan memperhatikan muatan lokal, peningkatan kemampuan akademik dan profesionalitas tenaga pendidik, kemampuan kelembagaan lembaga pendidikan melalui prinsip desentralisasi serta otonomi keilmuan dan pemantapan manajemen berbasis sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan.

Ketujuh; dalam meningkatkan mutu SDM adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, peningkatan kemampuan kelembagaan pelayanan kesehatan, dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta pemberdayaan peran serta masyarakat.

Kedelapan; untuk meningkatkan mutu manusia dan masyarakat melalui peningkatan program pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan keagamaan, peningkatan olahraga, peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan budaya daerah, maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan pengembangan organisasi masyarakat (*civil society*) dengan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi inisiatif masyarakat, mengurangi berbagai aturan yang menghambat, mengembangkan budaya kemandirian, keswadayaan serta mengembangkan jaringan kerja masyarakat guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya, lingkungan alam dan sosial-budaya setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan harkat dan mertabat masyarakat.

Kesembilan; untuk mewujudkan penegakkan hukum dan HAM, diupayakan melalui penegakkan kembali supremasi hukum dengan prioritas kebijakan yang meliputi: penyempurnaan dan pembaharuan peraturan daerah dan pengembangan budaya hukum; pemberdayaan lembaga peradilan, lembaga penegak hukum lainnya; serta penegakkan HAM melalui penuntasan penyelesaian berbagai KKN serta pelanggaran HAM, retifikasi hukum adat, peningkatan sarana dan prasarana HAM dan partisipasi masyarakat dalam penegakkan supremasi hukum.

Kesepuluh; untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kuat, bersih dan bebas KKN, maka peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan mutu aparatur, pembinaan dan pendidikan politik, pemberdayaan Badan Perwakilan Desa (BPD), DPRD dan pembinaan kelembagaan (*capacity building*) pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan. Disamping itu, tuntutan desentralisasi yang semakin kuat dan telah mengakar di masyarakat membutuhkan penanganan yang tepat agar keutuhan bangsa secara sosial, ekonomi, politik dan hukum dapat dipertahankan tanpa mengabaikan kekayaan dan keragaman budaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan di daerah mengungkapkan perspektif pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, tetapi merupakan kebersatuhan faktor-faktor politik, sosial, budaya, keamanan, ketertiban, pemerintahan dan otonomi daerah yang menguraikan tentang sejumlah problematik pembangunan di daerah NTT. Penguraian program tersebut didasarkan pada sejumlah nilai tambah yang dapat dihasilkan dari faktor-faktor potensi pembangunan daerah, yaitu : (1). Nilai tambah dari modal alamiah, (2). Nilai tambah dari modal fisik, (3). Nilai tambah dari modal manusia, (4). Nilai tambah dari modal sosial.

Berdasarkan kerangka pikir inilah, maka implementasi program pembangunan daerah propinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada satu filosofi pembangunan, yaitu : *Membangun Dari Apa Yang Dimiliki Rakyat Dan Apa Yang Ada Pada Rakyat*. Untuk menerapkan filosofi ini, maka dipilih Strategi Pembangunan Daerah, yaitu : Pertumbuhan Melalui Pemerataan, yang dalam implementasinya memiliki implikasi luas terhadap berbagai aktivitas perekonomian, pendidikan, kesehatan dan berbagai bidang pembangunan lainnya.

Propeda NTT tahun 2001-2004 terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: Program Pokok dan Program Penunjang. Program Pokok terdiri dari: (1). Pembangunan Ekonomi Rakyat, meliputi: (a). Pembangunan Ekonomi Produksi, dan (b). Pembangunan Prasarana Ekonomi. (2). Pembangunan Pendidikan Rakyat, (3). Pembangunan Kesehatan Rakyat. Program penunjang terdiri dari: (1). Penataan Ruang, (2). Kesejahteraan Sosial, (3). Hukum dan HAM, (4). Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (5). Agama, (6). Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.

I. PROGRAM POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

A. PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT

Perspektif pembangunan ekonomi di NTT memiliki 2 (dua) sub-ordinasi yaitu pembangunan ekonomi produksi dan pembangunan prasarana ekonomi. Kedua sub-ordinasi tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat saling melengkapi dan tidak saling meniadakan. Sinkronisasi dan keterpaduan program ekonomi produksi dan prasarana ekonomi dimaksudkan untuk menguraikan secara jelas tentang strategi pembangunan daerah yang pada satu sisi harus dapat menjawab sebab-sebab pertumbuhan seperti: peningkatan produktivitas, dan investasi yang dapat mendorong mobilitas faktor-faktor produksi dan pada sisi lain harus dapat menguraikan tentang aspek-aspek pemerataan itu sendiri seperti: pemerataan kepemilikan faktor-faktor produksi (tanah, modal, sewa, bunga, tenaga kerja), dan pemerataan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik serta pemerataan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Secara umum pembangunan ekonomi rakyat mempunyai pendukung utama yaitu bidang pembangunan ekonomi produksi dan prasarana ekonomi. Kedua bidang tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi rakyat pada periode 2001-2004 diarahkan untuk meningkatkan daya beli melalui penyerasan kedua komponen tersebut.

1. UMUM

1.1. EKONOMI PRODUKSI

Kinerja ekonomi sangat tergantung pada kinerja sektor-sektor produksi yaitu; sektor pertanian, industri dan perdagangan, pertambangan, pariwisata dan jasa yang pada dasarnya berorientasi pada pasar domestik maupun internasional. Potensi daerah yang menjadi **kekuatan** dan **peluang** dalam pembangunan ekonomi rakyat, adalah sebagai berikut:

- a. Potensi Lahan. Potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tanaman pangan dan perkebunan. Potensi lahan untuk tanaman pangan dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu potensi lahan basah 127.271 Ha dan lahan kering 1.528.308 Ha. Berdasarkan kelas kesesuaian lahan terdiri dari tiga klasifikasi yaitu kecocokan tinggi (S1) seluas 202.810 Ha dan kecocokan sedang (S2) 478.930 Ha dan kecocokan terbatas (S3) 846.568 Ha. Selanjutnya potensi pengembangan perkebunan sesuai Rencana Dasar Pengembangan Wilayah Perkebunan (RDPWP) mencapai luas 888.931 atau 18,77 % dari luas wilayah Nusa Tenggara Timur.
- b. Potensi Padang. Usaha peternakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan padang penggembalaan atau terintegrasi dengan usaha tanaman pangan atau perkebunan dengan memanfaatkan limbah pertanian tanaman pangan dan pakan yang secara khusus dibudidayakan. Apabila usaha peternakan menggunakan padang rumput dan alang maka terdapat peluang sumber pakan ternak pada areal seluas 1.939.801 Ha.
- c. Potensi Perairan. Sumber bahan pangan untuk ketahanan pangan dan gizi juga dapat diperoleh dari pemanfaatan sumber daya perairan, terutama laut. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari perairan laut atau 80.86 % wilayah yang luasnya diperkirakan sekitar 200.000 Km², belum termasuk perairan ZEEI dengan garis pantai yang panjangnya mencapai 5.700 km. Sumber daya hayati laut Nusa Tenggara Timur multispecies dengan total potensi 240.000 ton/tahun belum termasuk potensi nener 680.000.000 ekor/tahun.
- d. Potensi Pariwisata. Usaha pariwisata cukup potensial dan dapat menjadi sumber utama pembangunan daerah. Potensi wisata yang ada diantaranya; (i) wisata alam; Reptil Raksasa Komodoensis terdapat di pulau Komodo, Riungensis (Mbou) terdapat di kabupaten Ngada,

danau Tiga Warna Kelimutu di Kabupaten Ende, obyek wisata bawah laut (taman laut) di pantai Maumere dan di gugusan 17 pulau di Riung, di teluk Kupang serta panorama pantai pasir putih dan gulungan ombak di Nemberala Rote Kabupaten Kupang. (ii) wisata budaya dan spiritual; atraksi peperangan tradisional berkuda atau Pasola di Sumba, atraksi tinju dan cambuk tradisional di Kabupaten Ngada dan Manggarai, Kebudayaan/masyarakat Asli Bena Di Kabupaten Ngada, perburuan Ikan Paus di Lamalera - Lembata dan Prosesi Agama di Larantuka, (iii). Wisata buatan, tersebar diseluruh wilayah NTT.

- e. Potensi Lokasi Industri. NTT memiliki 3 (tiga) lokasi industri strategis sebagai pintu gerbang menuju kawasan negara pasifik dan Australia yang memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi yaitu : (1). Kawasan Industri Bolok (KI Bolok) Agroindustri berbasis sektor pertanian dengan luas sekitar 900 Ha; (2) Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu (KAPET Mbay) dengan basis kegiatan agroindustri khususnya sektor perkebunan yang meliputi keseluruhan wilayah pembangunan di Flores. (3). Kawasan industri berbasis agroindustri peternakan di Perbatasan Timor Barat. Kawasan ini berfungsi sebagai zona penyangga pembangunan perdagangan dan jasa yang merupakan potensi baru dalam rangka kerjasama perdagangan lintas batas dengan calon negara baru eks Timor Timur.
- f. Potensi Pertambangan. Terdapat cukup banyak potensi tambang yang dimiliki Nusa Tenggara Timur yang dapat menjadi sumber utama perekonomian masyarakat. Jenis pertambangan potensial seperti; minyak bumi, marmer, batu aji dan potensi tambang lainnya. Eksplorasi potensi pertambangan dengan melibatkan masyarakat, mengingat potensi pertambangan yang beraneka ragam dan mempunyai prospek ekonomi yang tinggi tersebar di seluruh wilayah

berpeluang menumbuhkan investasi industri sehingga dapat menjadi sumber ekspor wilayah.

- g. Potensi hutan. pengelolaan hutan produksi yang berpotensi ekspor diantaranya; Kayu Cendana, Gaharu, Asam, Kutu Lak dan Kayu manis.
- h. Potensi kawasan. Enam belas Kawasan Prioritas Pertanian yaitu kawasan Oesao, Bena, Aeroki, Besikama, Lantoka, Tanjung Bunga, Magepanda, Mautenda, Mbay, Satargizing – Panondiwal, Iteng, Lembor, Nangalili, Lewa - Mataiang, Wanokaka – Anakalang, Kodi – Laratama dengan basis utama kegiatan produksi pada kegiatan agribisnis dengan pola pengembangan terpadu dimana komoditas utama untuk wilayah Timor dan Sumba adalah ternak Sapi dan untuk wilayah Flores, Lembata dan Alor komoditas utamanya adalah perkebunan.
- i. Jasa-jasa. Posisi strategis sektor ini dikaitkan dengan posisi geografis yaitu berada pada wilayah paling selatan Indonesia yang menempatkan Kupang sebagai pintu gerbang selatan. Kondisi ini mengakibatkan Kupang sebagai lalu lintas kegiatan ekonomi dan pariwisata negara Australia dan negara-negara pasifik.

Potensi yang ada, telah banyak dikembangkan baik melalui sumber dana pemerintah, investasi swasta maupun swadana dari masyarakat. Akumulasi kegiatan pembangunan ekonomi tersebut menghasilkan kinerja perekonomian daerah sebagai berikut:

1. *Pertumbuhan ekonomi.* Perekonomian Propinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1997 mengalami tekanan yang cukup besar akibat krisis ekonomi yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada Pelita V mencapai rata-rata 7,32 % dan pada tahun 1997 (atas dasar konstan 1993) sebesar 5,62%, tetapi tahun 1998 menurun menjadi - 4,99%. Sementara itu bila diamati per sektor, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.1, menurunnya

pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 1998 disebabkan karena hampir semua aktivitas ekonominya bertumbuh negatif. Dampak dari pertumbuhan negatif yang cukup besar di sektor pertanian akhirnya turut pula mempengaruhi pertumbuhan Sektor Perdagangan. Pada tahun 1999, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 2,74 %. Kondisi tersebut mengindikasikan perekonomian Nusa Tenggara Timur makin baik.

2. *Struktur Perekonomian.* Perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor primer atau sektor pertanian sebesar 44,05%, sektor tersier yang terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran, pengakutan dan komunikasi, keuangan, pariwisata dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya sebesar 44,04%, sektor sekunder yang terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air minum sebesar 11,91%.
3. *Produktivitas Tenaga Kerja.* Nilai produktivitas tenaga kerja ditunjukkan oleh besarnya nilai output yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Pada tahun 1998 produktivitas pekerja di NTT menurun sebesar - 3,88% yakni dari 1,59 juta Rupiah pada tahun 1997 menjadi 1,54 juta Rupiah di tahun 1998. Selanjutnya daya serap tenaga kerja pada sektor primer mengalami penurunan yang diindikasikan oleh pergeseran relatif sebesar minus 1,77 %; namun secara absolut terdapat kenaikan tenaga kerja di sektor primer sebesar 14.213 orang. Secara relatif, sektor sekunder dan tersier mengalami pergeseran positif sebesar positif 1,33 % dan positif 0,44%. Demikian pula secara absolut, terjadi penambahan tenaga kerja di sektor tersebut sebesar 42.563 dan 24.458 orang. Secara keseluruhan terjadi penambahan tenaga kerja sebesar 81.234 orang. Kondisi ini menunjukkan kurang signifikan terhadap pemberdayaan tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor sekunder dan tersier.
4. *Pendapatan Perkapita.* Rendahnya nilai produktivitas per kapita di atas berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat NTT. Pada tahun 1993 pendapatan perkapita di Nusa Tenggara Timur baru sebesar 579,9 ribu

Rupiah dan untuk Indonesia sudah mencapai 1,5 juta Rupiah. Walaupun kinerja perekonomian Nusa Tenggara Timur cukup baik dan mampu meningkatkan pendapatan perkapita menjadi 1,4 juta Rupiah pada tahun 1999, namun sama sekali belum mampu mengejar pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang telah mencapai 4,2 juta Rupiah pada tahun ini. Bahkan pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur pada tahun 1999 masih sedikit di bawah pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 1993.

5. *Neraca Perdagangan.* Dari 7 komoditas bahan pangan yang dikonsumsi berdasarkan kemampuan penyediaan dan kebutuhan pangan dan gizi, untuk tahun 1998 semua mampu dipenuhi kecuali komoditas beras dan kedele. Selain kedua komoditas tersebut, NTT mengimpor sebagian besar produk-produk pendukung pembangunan daerah yakni; (i) Bidang pembangunan ekonomi seperti: mesin-mesin, pupuk, obat-obatan dan teknologi, (ii) Bidang pembangunan sosial; perlengkapan bidang kesehatan dan pendidikan, (iii) Bidang pembangunan Fisik dan prasarana; sarana dan prasarana transportasi dan lainnya. Walaupun belum ada penelitian tentang neraca perdagangan secara intensif, impor NTT jauh melampui kemampuan eksportnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek substitusi impor perlu mendapat perhatian khusus agar hilangnya sumber pertumbuhan wilayah dapat ditekan. Untuk mengimbangi impor yang tinggi maka perkembangan ekspor perlu didorong guna mencapai neraca perdagangan surplus.

Kelemahan dan ancaman pembangunan di daerah NTT antara lain :

1. *Kondisi penduduk.* 80% lebih penduduk berada di perdesaan dan berkerja pada sektor pertanian sub-sisten dengan kemampuan ekonomi dan sumber daya manusia yang rendah, sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing.
2. *Isolasi daerah.* Sebagian besar daerah memiliki wilayah-wilayah yang masih terisolir yang belum dapat diakses ke wilayah luar, sebagai akibat dari masih terbatasnya ketersediaan berbagai prasarana pembangunan.

3. *Lahan Pertanian.* Sebagian besar lahan pertanian berupa lahan kering serta musim hujannya relatif pendek, pemukiman penduduk tersebar mengikuti sebaran wilayah-wilayah potensial, sebagian besar wilayahnya tergolong rawan bencana alam berupa : gempa bumi, letusan gunung, erosi, gelombang pasang, dan rawan terhadap serangan hama penyakit akibat fluktuasi musim.
4. *Kemiskinan.* Ukuran kemiskinan yang dipakai adalah menurut ukuran kemiskinan BPS dan BKKBN. Menurut ukuran BPS, pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin sebanyak 1.606.600 orang atau sebesar 42,20% dari jumlah penduduk yang terdiri dari 1.470.100 berada di pedesaan atau sekitar 44,47% dari keseluruhan jumlah penduduk miskin dan 136.500 berada di kota atau sekitar 27,24% dari keseluruhan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan ukuran kemiskinan BKKBN, pada tahun 1999 jumlah KK sebanyak 804.399 KK, terdiri dari 550.146 KK miskin dalam arti keluarga pra sejahtera dan sejahtera I atau sebesar 68,39%.
5. *Ketergantungan biaya pembangunan/fiskal.* Tingkat ketergantungan fiskal atau pembiayaan pembangunan di daerah terhadap pemerintah pusat sangat besar kira-kira 80 - 85% dari keseluruhan dana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), kendatipun kepada setiap daerah telah diberikan dana perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif cukup besar. Sebab kontribusi PAD terhadap APBD relatif sangat kecil kira-kira 15 – 20%.
6. *Produk unggulan daerah.* Produk unggulan daerah kurang memiliki daya saing baik komparatif maupun kompetitif dengan produk unggulan sejenis di daerah-daerah di luar NTT. Kondisi ini ditunjukkan oleh kemampuan perdagangan (ekspor dan antar pulau) masih sangat terbatas.
7. *Kondisi sosial, politik, ekonomi nasional yang labil.* Hal ini merupakan suatu kemutlakan bagi daerah manakala daerah melakukan berbagai aktivitas pembangunan.

1.2. PRASARANA EKONOMI

Prasarana ekonomi merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi produksi. Bidang-bidang pembangunan yang terkait langsung dengan pembangunan prasarana ekonomi adalah : pertanahan, prasarana perhubungan, prasarana permukiman, lingkungan hidup, tata ruang dan prasarana sumber daya air. Uraian tentang ***Kekuatan dan Peluang*** dalam pembangunan prasarana ekonomi adalah:

a. *Pertanahan.*

Status tanah merupakan salah satu *issue* yang banyak mempengaruhi minat investasi, terutama kegiatan usaha yang membutuhkan tanah yang luas seperti kegiatan pertanian, perkebunan, hutan tanaman industri atau kegiatan pertambangan. Tanah sebagai salah satu faktor produksi memiliki nilai guna ekonomi yang sangat potensial dan merupakan daya tarik investasi. Oleh karena itu, maka perlu dicari pola pendekatan yang dapat menjawab 2 (dua) kepentingan sekaligus yaitu antara kepentingan pemilik tanah dan dunia usaha. Pola-pola pendekatan yang dapat dikembangkan antara lain: pola sewa, pola penyertaan modal, pola penyerahan kepada negara atau dunia usaha untuk dikelola melalui Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB).

b. *Prasarana Permukiman Wilayah.*

Pembangunan permukiman telah menunjukkan n keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya permukiman layak huni, meningkatnya kualitas rumah penduduk dan meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana permukiman seperti jalan dalam permukiman, tersedianya air bersih, pasar, sekolah dan lainnya. Masalah permukiman di perkotaan tidak terlepas dari fenomena dan dinamika kehidupan diperkotaan. Kondisi ini ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, tingkat urbanisasi penduduk yang cepat.

Dalam rangka percepatan pembangunan permukiman, maka beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah : (a) dukungan

kebijakan yang menempatkan permukiman sebagai prioritas. (b) adanya kebijakan kredit perumahan dan (c) adanya kemitraan dalam pembangunan perumahan. Kebijakan ini ditempuh sekaligus untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan permukiman, antara lain: (a) Kebutuhan perumahan terkait dengan kebutuhan fasilitas umum permukiman kota yang tinggi, secara akumulatif terbentur pada kebutuhan ruang di perkotaan yang cenderung menjadi sempit; (b) Kemampuan pendanaan masyarakat untuk menyiapkan perumahan yang layak huni terbatas; (c) Usaha *property* di daerah ini sangat terbatas sebagai akibat dari kemampuan warga kota sebagai konsumen perumahan memang sangat terbatas; (d) Belum ada perusahaan milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan permukiman warga kota.

Berbeda dengan permasalahan permukiman diperdesaan yaitu belum adanya pengaturan permukiman sesuai tata ruang desa, sehingga terdapat lokasi perumahan yang terpencar yang berpengaruh terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial. Disamping itu, kekurangmampuan ekonomi masyarakat pedesaan telah mengakibatkan kurang tersedianya hunian yang layak dan memenuhi standar kesehatan.

c. Prasarana Perhubungan Wilayah.

Aksesibilitas wilayah terutama berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi internal, antar wilayah, dan ke luar wilayah. Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang ditunjukkan oleh jumlah dan rasio ketersediaan terhadap penduduk masih kurang. Namun demikian dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada cukup menunjukkan bahwa perekonomian di daerah sudah dapat berjalan dan telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Kondisi ini dapat ditunjukkan oleh :

1. Perhubungan darat. Transportasi darat didukung oleh prasarana jalan, terminal dan Angkutan danau dan Sungai. Berdasarkan statusnya propinsi NTT memiliki jalan nasional sepanjang 1.121,87 km, jalan propinsi sepanjang

2.939,86 km, dan jalan kabupaten sepanjang 12.866,81 km. Kualitas jalan sebagai urat nadi perhubungan berdasarkan permukaan jalan menunjukkan hanya 46,3 % jalan beraspal di Nusa Tenggara Timur, 17,2 % jalan kerikil, 35,3 % jalan tanah dan 1,3 % lainnya. Secara umum untuk jalan berstatus jalan Nasional dan jalan Propinsi, Kota Kupang merupakan satu-satunya wilayah yang mempunyai kualitas jalan 100 % aspal dengan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah mencapai 3,511. Itu berarti Kota Kupang dapat dikatakan mempunyai aksesibilitas wilayah yang paling baik dibandingkan kabupaten lainnya. Sedangkan wilayah lainnya perlu ditingkatkan secara terus menerus.

2. Perhubungan Laut. Wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki 22 Pelabuhan Laut yang telah memiliki fasilitas dermaga, dan terdapat 12 Pelabuhan Tradisional yang dikunjungi Kapal Motor, Kapal Perintis dan Perahu Layar namun belum memiliki Fasilitas Pelabuhan. Pelayanan angkutan laut dalam Propinsi Nusa Tenggara Timur baik angkutan penumpang maupun barang serta hewan dilakukan dengan mengoperasikan beberapa jenis sarana angkutan laut seperti Kapal Expres milik PT. PELNI, Kapal Perintis, Kapal Motor, Kapal Layar Motor dan Perahu Layar. Saat ini kapal expres milik PT. PELNI yang menyinggahi pelabuhan di Nusa Tenggara Timur terdapat 4 (empat) unit kapal, sedangkan terdapat 3 (tiga) unit Kapal Perintis menyinggahi 18 (delapan belas) Pelabuhan. Pola jaringan transportasi yang ada saat ini di wilayah Nusa Tenggara Timur masih didasarkan pada kebutuhan mendasar masyarakat berupa pemberian pelayanan jasa transportasi pada daerah terpencil, pulau-pulau pada daerah perbatasan, pesisir pantai serta memberikan pelayanan berupa peningkatan tingkat keamanan dari segi kecelakaan khususnya angkutan laut.
3. Perhubungan Udara. Di NTT terdapat 14 Bandara, dengan melayani 13 trayek domestik dan 1 trayek internasional (Kupang - Darwin). Dari 14 Bandara tersebut terdapat beberapa Bandara yang relatif jarang didarati,

sedangkan lainnya tetap dilayani walaupun dengan frekwensi terbatas, hal tersebut disebabkan karena semakin lancarnya lalu lintas angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan.

4. Pos, Telekomunikasi dan Geofisika. Perkembangan sarana pos yang ada dan tersebar diseluruh daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah : Kantor Pos : 126 Unit, Pos bergerak : 46 Unit, Unit Pelayanan Pos 47 Unit dan fasilitas Pos lainnya : 2.306 Unit. Sedangkan jaringan fasilitas telepon yang sudah menjangkau 124 Kecamatan yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 56 Kecamatan atau prosentase fisik penyebarannya sebesar 48,9 %. Prasarana dan sarana meteorologi dan geofisika di wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari 9 Stasiun Meteorologi, 2 Stasiun Geofisika dan 1 Stasiun Klimatologi.

d. Prasarana Sumber Daya Air Wilayah

Kondisi aktual di NTT menunjukkan bahwa adanya kebutuhan yang sangat mendasar akan sumber daya air dan irigasi. Oleh karena itu, maka telah dilaksanakan upaya-upaya strategis dengan memanfatkan berbagai teknologi dalam pembangunan sumber daya air diantaranya yaitu; pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pembangunan embung, pembangunan sumur bor dan penyediaan jebakan-jebakan air untuk konservasi sumber daya air.

Upaya tersebut telah memberi peran yang sangat signifikan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial dengan indikasi; meningkatnya jangkauan pelayanan irigasi teknis, peningkatan pelayanan air baku untuk air bersih dan meningkatnya jumlah sumur bor untuk irigasi serta untuk pelayanan kegiatan produktif lainnya . Daerah Irigasi mencapai 1.403 buah dengan kemampuan potensial 213.814 ha dan kemampuan fungsional 90.896 Ha dengan rincian sesuai jenis irigasi sebagai berikut: (i) Irigasi teknis tersebar di 25 Daerah Irigasi dengan kemampuan potensial 35.643 Ha dan kemampuan Fungsional 11.718 Ha; (ii) Irigasi semi teknis tersebar di 133 Daerah Irigasi

dengan kemampuan potensial 57.511 Ha dan kemampuan Fungsional 25.754 Ha; dan (iii) Irigasi sederhana tersebar di 1.245 Daerah Irigasi dengan kemampuan potensial 120.687 Ha dan kemampuan Fungsional 53.424 Ha.

Disamping irigasi tersebut di atas, pelayanan sumber daya air juga dilakukan melalui : (i) Irigasi desa (PID) yang kemampuan fungsionalnya saat ini baru mencapai 52.386 Ha dari potensi 90.436 Ha; (ii) Embung Irigasi 19 buah dengan luas potensial 4.146 Ha. dan embung kecil 281 buah; (iii) Jaringan Irigasi Air Tanah 325 daerah irigasi dengan luas areal 1.364 Ha; (iv) Sumur bor yang dimanfaatkan untuk irigasi ada 380 buah dengan JIAT 2.589 Ha.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan irigasi, telah dilakukan pembinaan perhimpunan petani pemakai air (P3A): 450 P3A Irigasi, 40 P3A Gabungan, 360 P3A JIAT, 21 P3A Embung Irigasi, dan 279 P3A embung kecil. Sesuai perkembangan P3A, menunjukkan n kecenderungan yang makin baik yang ditandai dengan adanya penetapan kelompok secara formal oleh Bupati pada masing-masing kabupaten.

e. *Lingkungan Hidup*

Orientasi pembangunan yang cenderung terpusat serta bersifat jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap kemerosotan kualitas dan daya dukung lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Untuk menghindari dampak yang lebih besar diperlukan upaya penanganan lingkungan hidup secara integratif dan menyeluruh.

Kelemahan dan ancaman pembangunan prasarana ekonomi adalah:

1. Konflik tanah.

Dalam pembangunan bidang pertanahan perlu diantisipasi permasalahan-permasalahan yang menonjol terutama dalam kerangka kegiatan investasi yaitu ; (i) Kepastian akan adanya lahan yang siap bangun. (ii) Kepastian hak atas tanah yang didukung dengan bukti hak berupa sertifikat, baru mencapai lebih

kurang 25 % dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada, (iii) Ketimpangan struktur pemilikan penguasaan tanah baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan, (iv) Adanya berbagai konflik suku yang bersumber dari tidak jelasnya batas penguasaan tanah-tanah suku, (v) Kurang lengkapnya bukti dasar kepemilikan atas tanah sesuai ketentuan, (v) Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang belum memadai, (vi) Luasnya jangkauan layanan yang belum ditunjang dengan sarana dan prasarana transportasi yang cukup dan (vii) Keterbatasan kemampuan pelayanan penyelesaian masalah pertanahan yang berkaitan dengan pengukuran dan pendaftaran tanah serta kurang tersedianya sarana peta bidang tanah.

Pembangunan bidang pertanahan juga mempunyai ancaman akibat pengaruh eksternal yang perlu diantisipasi dalam pembangunan bidang pertanahan yaitu masih terpusatnya kebijakan pembangunan pertanahan yang kurang mampu mengantisipasi kondisi-kondisi sebagai berikut ; (i) Terjadinya alih fungsi dan fragmentasi tanah pertanian yang tidak terkendali sehingga penguasaan dan pengusahaan tanah pertanian tidak ekonomis, (ii) Adanya konflik kepentingan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. (iii) Pelaksanaan kegiatan pengaturan, penataan dan pelayanan pertanahan yang masih bersifat sentralistik, (iv) Rendahnya kemampuan pengendalian dan penertiban pemanfaatan tanah terlantar baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

2. Belum optimalnya nilai guna pembangunan prasarana ekonomi.

Kondisi ini ditunjukkan oleh : (i) Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air, sehingga mempengaruhi kemampuan fungsional Irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi pedesaan, (ii) Tingkat kerusakan embung sangat tinggi yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar, (iii) Partisipasi petani dalam pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi masih terbatas, (iv) Menurunnya debit air yang disebabkan oleh degradasi Daerah Pengaliran Sungai (DPS), (v) Bencana

alam banjir yang dapat merusak prasarana bangunan air.

3. Rendahnya kualitas lingkungan.

Pembangunan bidang lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan dan lingkungan hidup sosial. Permasalahan lingkungan hidup alami berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan air, menurunnya produktivitas lahan, degradasi lingkungan wilayah pesisir, dan laut serta merosotnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh intensitas pengeboman terumbu karang yang cukup tinggi dan adanya pembakaran hutan dan perambahan hutan serta tata guna hutan dan tanah yang belum jelas dan memadai.

Lingkungan buatan meliputi pembangunan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang kurang berwawasan lingkungan, adanya peningkatan limbah domestik, limbah industri, dan polusi udara dari kendaraan bermotor serta terbatasnya ruang terbuka hijau seperti taman kota, lapangan olah raga, tempat rekreasi di perkotaan. Selanjutnya lingkungan hidup sosial mencakup adanya konflik kepentingan antar berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup akibat perbedaan pranata, gaya hidup, sikap mental, perilaku, perbuatan dari masing-masing kelompok sosial dalam masyarakat.

Segi-segi kelemahan dan ancaman dalam pembangunan lingkungan hidup antara lain : (a). Seringnya terjadi bencana alam, kekeringan, banjir, dan tanah longsor dan lahan kritis. (b). Adanya kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi jangkah pendek sehingga mengakibatkan kurang serimbangnya antara produktivitas, stabilitas, dan ekuitabilitas lokal, (c). Kurangnya kemitraan kerja antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, (d). Penggunaan teknologi dalam Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam belum ramah lingkungan.

2. ARAH PEMBANGUNAN

2.1. EKONOMI PRODUKSI

Arah pembangunan dimaksud dilaksanakan untuk mencapai kemampuan ekonomi, melalui peningkatan nilai tambah riil produksi komoditi pertanian penghasil bahan pangan dan gizi yang meliputi peningkatan nilai materi, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan daerah, dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu :

a. Aspek Produksi

Aspek produksi ditujukan bagi penguatan berbagai institusi pelaksana pembangunan dalam berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat ke arah peningkatan produksi dan produktivitas, sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli, peningkatan pengetahuan dan peningkatan derajat kesehatan. Aspek ini ditekankan pada pelaksanaan berbagai aktivitas pembangunan yang berbasis pada aktivitas pembangunan di bidang pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Industri dan Perdagangan, Pariwisata, Pertambangan dan Energi, serta Pengembangan Jasa-Jasa.

b. Aspek Distribusi (Pasar)

Aspek ini ditujukan bagi : (i). Memperluas jaringan distribusi pemasaran hasil-hasil pembangunan yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian baik untuk memenuhi pasar domestik maupun pasar internasional, seperti : produk-produk unggulan pertanian yang dihasilkan oleh berbagai unit usaha di dalam masyarakat. (ii). Memperbesar skala usaha bagi unit-unit usaha. (iii). Menciptakan segmen pasar baru, sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dari unit-unit usaha.

Disamping itu, aspek ini dimaksudkan sebagai cara untuk meningkatkan keragaman produk, sehingga dapat mendorong terciptanya distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi, distribusi penikmatan hasil-hasil pembangunan di dalam dan di luar daerah serta distribusi peran dari para pelaku pembangunan dalam proses pengambilan keputusan.

c. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan pembangunan merupakan salah satu masalah penting dalam keseluruhan mekanisme pembangunan. Pembiayaan pembangunan yang diperuntukan bagi pelaksanaan program pokok pembangunan daerah harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan program penunjang pembangunan daerah. Pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber pembiayaan pembangunan ditujukan bagi pencapaian berbagai kemajuan, perkembangan pembangunan khususnya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan perubahan struktur ekonomi dan peningkatan penciptaan lapangan kerja serta perluasan kesempatan kerja.

Pola pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber pembiayaan pembangunan perlu diletakan secara proporsional sehingga mengurangi ketimpangan pembiayaan pembangunan di berbagai bidang pembangunan atau dapat mendorong tingkat produksi dan produktivitas masyarakat dan daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Berdasarkan pertimbangan ini, maka perlu diakumulasikan berbagai sumber pembiayaan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan sumber pembiayaan luar negeri, sehingga pola alokasi pembiayaan pembangunan yang dilakukan memiliki kesejajaran arti dengan pola persebaran kegiatan prioritas dari dan dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam rangka itu, maka dalam mengalokasikan pembiayaan pembangunan menurut ukuran prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip :

1. *Efisiensi dan Efektivitas*, dimaksudkan untuk mengetahui perimbangan antara penggunaan *input* dan *output* dan demikian pula sebaliknya, sehingga diperoleh suatu hasil pembangunan yang memiliki kandungan makna *outcome*, *impact*, dan *benefit* sesuai dengan upaya perbaikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. *Berimbang dan Dinamis*, alokasi dana pembangunan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang realistik, baik yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah maupun dari *public saving* serta pinjaman pemerintah daerah
3. *Disiplin Anggaran*, anggaran unit pelaksana disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan tepat guna, tepat waktu, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran di atas, maka perencanaan pembiayaan pembangunan mengacu pada kriteria-kriteria, sebagai berikut:

1. Secara langsung dapat membuka dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.
2. Secara cepat dapat menghasilkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan secara langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Meningkatkan akses dan pelayanan sosial yang didukung dengan prasarana dasar dan pelayanan sosial dasar masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat.
4. Secara langsung dapat mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan daerah yang dapat mendorong perubahan struktur ekonomi melalui peningkatan kegiatan ekonomi rakyat yang mandiri, berskala ekonomi dan

berorientasi pasar melalui pengembangan koperasi dan UKM serta berbagai lembaga ekonomi, sosial, budaya lainnya yang berada dimasyarakat.

5. Peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia melalui program peningkatan mutu dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi pemberantasan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan pelayanan air bersih dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, prasarana pendidikan serta prasarana lainnya.

Pelaksanaan pembangunan daerah perlu didekati dari berbagai kondisi pembangunan yang sesuai dengan kondisi kemasyarakatan di NTT melalui berbagai pentahapan pembangunan seperti : tahap penyelamatan dan pemulihan, tahap stabilitas dan tahap pertumbuhan. Oleh karena itu, maka pendekatan yang dilakukan adalah :

1. ***Kultural Religius.*** Implementasi rencana pembangunan terkait dengan keragaman sosio kultur masyarakat dan kondisi rakyat yang taat beragama yang menuntun pola pikir, sikap dan perilaku hidupnya sehari-hari. Dengan demikian nilai-nilai budaya dan agama itu akhirnya turut membentuk pula struktur serta strata kemasyarakatan.
2. ***Ekosistem Ekologi,*** Sesungguhnya terdapat saling ketergantungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Berkaitan dengan itu setiap upaya pembangunan harus mengakomodasi tumbuhnya interaksi sub-sub sistem lingkungan yang mampu menumbuhkan sinergi dengan kehidupan manusia secara lestari.
3. ***Terpadu, terpandu dan berkelanjutan.*** Ekonomi rakyat, kesehatan rakyat dan pendidikan rakyat yang menjadi prioritas program pembangunan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena saling mempengaruhi, saling mendukung, dan saling meneguhkan. Dengan

demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik akan dilakukan secara bekesinambungan.

Berdasarkan arah pembangunan daerah, prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dan kriteria-kriteria pembiayaan pembangunan serta pendekatan pembangunan seperti diuraikan di atas, maka dengan menggunakan analisis statistik, dapat diproyeksikan kemajuan perekonomian NTT periode 2001 – 2004 seperti pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Proyeksi Beberapa Indikator Ekonomi Makro Nusa Tenggara Timur

INDIKATOR	2001	2002	2003	2004
Indikator Pokok				
Laju Inflasi (%)	10 -12	9 - 11	8 - 10	7 - 9
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4 - 5,5	4,1-5,7	4,1- 5,8	4,2 - 6
PDRB per kapita (Ribu Rp)	2.096	2.386	2.719	3.103
<i>Sumbangan pada pertub. Ekonomi (%)</i>				
a. Permintaan Akhir				
Konsumsi	4,18	4,22	4,24	4,27
a. Masyarakat	2,45	2,45	2,43	2,42
b. Pemerintah	1,73	1,77	1,81	1,85
Investasi (termasuk perubahan stok)	0,57	0,56	0,54	0,52
Ekspor & antar pulau keluar, neto	0,40	0,50	0,62	0,74
a. Ekspor dan antar pulau keluar	3,36	3,57	3,79	4,02
b. Impor dan antar pulau masuk (-)	2,97	3,07	3,17	3,28
b. Sektoral				
Pertanian	1,21	1,19	1,17	1,14
Perdagangan	1,92	2,05	2,18	2,32
Jasa	0,70	0,69	0,68	0,67
Lainnya (gabungan 6 sektor)	1,32	1,34	1,37	1,41

Sumber : Diprediksi Dari Hasil Analisis Data NTT Dalam Angka 1995-1999.

Di sisi produksi, sektor pertanian yang telah terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian Nusa Tenggara Timur selama terjadinya krisis diperkirakan masih akan memiliki peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2001 sektor ini diperkirakan akan mampu menyumbang sebesar 1,21 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sebesar 4 persen sampai dengan 5,5 persen dan akan terus meningkat kontribusinya menjadi 1,14 persen pada tahun 2004 terhadap perkiraan total pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2 persen sampai dengan 6 persen. Sektor perdagangan diperkirakan akan menjadi

penyumbang terbesar terhadap total PDRB yaitu 1,92 persen dari perkiraan total pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen sampai dengan 5,5 persen pada tahun 2001 dan terus meningkat menjadi 2,32 persen dari perkiraan total pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2 persen sampai dengan 6 persen pada tahun 2004.

Proyeksi struktur perekonomian Nusa Tenggara Timur seperti pada tabel 3.2. menggambarkan bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan dan jasa tahun 2001 sampai dengan 2004 diperkirakan tetap dan yang mengalami perubahan hanya pada enam sektor ekonomi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan di sektor-sektor tersebut kurang signifikan terhadap perubahan struktur perekonomian NTT pada periode yang sama. Itu berarti bahwa perubahan struktur perekonomian yang menggambarkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang sedianya dapat mengubah pola kehidupan masyarakat belum menunjukkan suatu kemajuan yang dapat diandalkan.

Tabel 3.2

Proyeksi Stuktur Ekonomi Nusa Tenggara Timur

Sektor	2001	2002	2003	2004
Laju Pertumbuhan (%)				
Pertanian	3,24	3,24	3,24	3,24
Perdagangan	12,08	12,08	12,08	12,08
Jasa	3,50	3,50	3,50	3,50
Lainnya	4,96	5,07	5,19	5,33
Peranan terhadap PDRB (%)				
Pertanian	42,12	41,24	40,32	39,38
Perdagangan	20,88	22,19	23,56	24,97
Jasa	14,33	14,06	13,78	13,49
Lainnya	22,68	22,51	22,34	22,16

Sumber : Diprediksi Dari Hasil Analisis Data NTT Dalam Angka Tahun 1995-1999.

Dalam rangka mencapai perubahan struktur ekonomi seperti di atas maka diperlukan dukungan investasi. Perkiraan kebutuhan investasi sebagaimana terurai dalam tabel 3.3 dibawah ini, dihitung berdasarkan *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yaitu hubungan yang menjelaskan antara perbandingan jumlah kenaikan *output* (pendapatan) yang disebabkan oleh kenaikan atau adanya tambahan modal tertentu. Dengan perkiraan rata-rata ICOR per tahun sebesar 3,2 artinya bahwa setiap kenaikan *output* (pendapatan) 1 unit diperlukan tambahan modal atau investasi sebesar 3,2 unit, maka dapat diperkirakan jumlah investasi yang dibutuhkan.

Tabel 3.3

Distribusi Perkiraan Kebutuhan Investasi NTT
(Persen)

Sektor	2001	2002	2003	2004
Pertanian	15,25	14,43	13,63	12,85
Perdagangan	42,95	44,13	45,24	46,29
Jasa	10,61	10,07	9,54	9,01
Lainnya	31,19	31,37	31,59	31,85
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Milyar (Rp)</i>	1.733,5	2.080,0	2.500,9	3.013,3

Sumber : Diprediksi Dari Hasil Analisis Data NTT
Dalam Angka 1995-1999.

Kondisi perubahan struktur ekonomi di atas akan diikuti dengan penciptaan lapangan kerja baru di seluruh sektor ekonomi. Secara keseluruhan pada tahun 2001 diharapkan dapat diciptakan sekitar 77,81 ribu lapangan kerja baru dan jumlahnya terus meningkat menjadi sekitar 91,58 ribu lapangan kerja baru pada tahun 2004. Dari seluruh sektor ekonomi yang diperkirakan paling banyak menciptakan lapangan kerja baru adalah sektor pertanian, yaitu mencapai sekitar 61,71 persen pada tahun 2001 dan secara perlahan akan terus menurun menjadi sekitar 57,70 persen pada tahun 2004. Sementara penciptaan lapangan kerja baru di sektor perdagangan diperkirakan akan mencapai 19,08 persen dan

terus meningkat menjadi 22,82 persen pada tahun 2004. Sedangkan untuk sektor jasa-jasa diperkirakan 6,50 persen pada tahun 2001 dan akan menurun menjadi 6,12 persen pada tahun 2004. Penurunan ini terjadi karena diperkirakan akan terjadi kemajuan atau peningkatan peran dunia usaha atau swasta (masyarakat) yang bekerja di sektor jasa, sehingga secara bertahap pemerintah mengurangi perannya yang sejauh ini sangat dominan dan diharapkan pula terjadi peningkatan penciptaan lapangan kerja baru di sektor perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat atau swasta.

Tabel 3.4
Proyeksi Ketenagakerjaan NTT

Sektor	2001	2002	2003	2004
Distribusi Penciptaan Lapangan Kerja Baru (%)				
Pertanian	61,71	60,42	59,08	57,70
Perdagangan	19,08	20,28	21,53	22,82
Jasa	6,50	6,38	6,25	6,12
Lainnya	12,71	12,92	13,14	13,35
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00
(ribu orang)	77,81	82,06	86,64	91,58
Distribusi Tenaga Kerja (%)				
Pertanian	76,66	76,02	75,34	74,63
Perdagangan	6,91	7,43	8,00	8,60
Jasa	7,50	7,45	7,40	7,35
Lainnya	8,94	9,09	9,26	9,42
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00
(ribu orang)	1.995	2.077	2.164	2.256

Sumber : Diprediksi Dari Hasil Analisis Data NTT Dalam Angka Tahun 1995-1999.

2.2. PRASARANA EKONOMI

Arah pembangunan prasarana ekonomi adalah :

1. Meningkatnya kepastian hak atas tanah masyarakat yang didukung dengan sistem pengelolaan yang lebih baik sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam mengelola tanah yang dikuasainya atau dimilikinya.
2. Tertatanya struktur penguasaan pemilikan tanah sebagai daya tarik investasi yang lebih berorientasi pada penggunaan dan pemanfaatan tanah.
3. Membangun dan mengembangkan perumahan atau permukiman yang sehat dan layak huni sesuai Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Pedesaan yang terpadu, komprehensif dan aspiratif.
4. Membuka isolasi fisik daerah atau wilayah yang diarahkan pada peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal, sentra-sentra produksi dengan pusat pemasaran, kawasan cepat tumbuh, prioritas, andalan dan khusus.
5. Menyediakan berbagai jasa perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi melalui pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi berbagai prasarana perhubungan.
6. Meningkatkan kemampuan pengembangan sumber-sumber air baku, peningkatan layanan dan perluasan jangkauan layanan irigasi, embung, sumur bor, bendung, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebagai penyedia sumber-sumber air pada lahan kering dan peningkatan pengelolaan sumber daya air secara efisien dan efektif.
7. Terwujudnya pemulihan, pemantapan dan pengembangan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan alam, buatan dan sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan konservasi, pemeliharaan dan perlindungan, pengendalian dan pemanfaatan lingkungan hidup secara benar dan terarah, peningkatan budaya cinta lingkungan dalam masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup.

3. PROGRAM PEMBANGUNAN

3.1. EKONOMI PRODUKSI

Perkembangan kinerja ekonomi produksi sangat tergantung pada kinerja sektor-sektor produksi yaitu; sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, pariwisata dan jasa-jasa. Berdasarkan berbagai kemajuan, hasil pembangunan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan Propeda ini, maka pembangunan dan pengembangan ekonomi produksi dimaksudkan untuk menguraikan secara programatis tentang kegiatan-kegiatan produksi baik yang dilakukan secara personal (manusia) maupun yang dilakukan secara kelembagaan (masyarakat).

Atas dasar pertimbangan di atas, maka disusun Program Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Ekonomi Produksi, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Institusi Kepemilikan Lahan

Tujuan program ini : (1). Memberdayakan institusi-institusi kepemilikan tanah seperti: pemilik tanah, petani penggarap, buruh-tani dan penyewa tanah; (2). Mendistribusikan pemanfaatan kepemilikan tanah, sebagai salah satu faktor produksi yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan perekonomian.

Sasaran program ini adalah : (1). Tercapainya proporsi rasio penduduk terhadap penggunaan lahan; (2). Menurunnya jumlah penduduk dan rumah tangga miskin; (3). Berkurangnya beban ketergantungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif; (4). Terwujudnya model institusi dan pembentukan institusi kepemilikan lahan dan tersedianya data kepemilikan lahan; (5). Terlaksananya sosialisasi model institusi kepemilikan lahan;

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Melakukan pendaftaran dan pembuatan peta tanah menurut jenisnya; (2). Menyusun model-model institusi kepemilikan tanah; (3). Meredistribusikan penduduk pada lahan-lahan potensial;

(4). Melakukan sosialisasi model, monitoring dan evaluasi.

2. Program pengembangan Sarana Permodalan Pedesaan

Tujuan program ini adalah : (1). Menciptakan kondisi bagi keberlanjutan skema pendanaan yang ada dan memberikan dorongan yang kuat bagi penciptaan skema pendanaan pembangunan lainnya yang tidak bersifat duplikatif. (2). Memberikan jaminan atas pengajuan atau pemberian kredit usaha bagi masyarakat. (3). Membangun akses kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. (4). Mendorong masyarakat untuk menabung sebagian pendapatannya, sehingga meningkat investasi masyarakat.

Sasaran Program ini adalah : (1). Terwujudnya pemahaman masyarakat akan manfaat berbagai jenis skema pendanaan pembangunan; (2). Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengajuan kredit dan manfaat kredit bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi; (3). Terdokumentasinya jumlah kelompok sasaran penerima bantuan atau kredit usaha; (4). Terciptanya hubungan bisnis antara masyarakat dengan lembaga perbankan dan non-bank, serta lembaga penjamin kredit lainnya. (5). Meningkatnya jangkauan pelayanan jasa lembaga keuangan bank dan non bank (6) Meningkatnya jumlah penabung dan tabungan sebagai salah satu daya tarik investasi swasta; (7) Terwujudnya peningkatan daya serap kredit untuk masyarakat.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Menyusun model dan mekanisme pembentukan lembaga penjamin kredit bagi masyarakat. (2). Melakukan sosialisasi, (3). Membuat regulasi pelaksanaan dan kegiatan pendampingan. (4). Mengevaluasi manfaat langsung dan tidak langsung dari skema pendanaan pembangunan; (5). Menyusun alternatif model skema pendanaan pembangunan, (6). Melakukan sosialisasi tentang arti penting tabungan masyarakat dalam perencanaan investasi; (7). Mendirikan lembaga bank dan non bank; (8) Memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan program ini adalah (1) Meningkatkan dan mengembangkan citra Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri; (2). Mengembangkan basisi-basisi kegiatan ekonomi rakyat yang cepat menghasilkan/berproduksi; (3). Menumbuhkan iklim persaingan diantara sesama lembaga ekonomi masyarakat yang bertumpu pada mekanisme pasar.

Sasaran program ini adalah: (1). Terselenggaranya pendidikan dan latihan keterampilan usaha (wirausaha) bagi lembaga ekonomi masyarakat, (2). Meningkatnya peran koperasi dan UKM di berbagai sektor dan aktivitas ekonomi, (3). Terciptanya kondisi persaingan lembaga-lembaga ekonomi rakyat melalui peningkatan efisiensi produksi.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Mengembangkan pendidikan dan latihan keterampilan usaha; (2) Melakukan pendampingan melalui bimbingan dan konsultasi; (3) Menciptakan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi; (4) Menyediakan kemudahan akses terhadap berbagai sumber daya; (5) Menyediakan prasarana dan sarana usaha bagi masyarakat; (6). Menyusun standarisasi melalui kurikulum dan modul pelatihan kewirausahaan. (7). Melakukan sosialisasi informasi secara luas kepada masyarakat. (8). Melakukan pelatihan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara selektif.

4. Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Tujuan program ini adalah (1). Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui usaha ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan; (2). Mengembangkan sistem ketahanan pangan, 3). Mengembangkan sistem agribisnis berbasis tanaman pangan dan hortikultura, 4). Mengembangkan kelembagaan pangan yang dapat mendorong kelancaran pola distribusi dan pola konsumsi pangan masyarakat; (5). Meningkatkan status gizi melalui distribusi dan pola konsumsi, (6).

Mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat. (7). Mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan.

Sasaran Program ini adalah (1). Terwujudnya optimalisasi kelembagaan penunjang, sarana dan prasarana agribisnis, 2). Meningkatnya jumlah dan kualitas petani; (3). Meningkatnya rasio kepemilikan petani terhadap luas lahan garapan; (4). Terwujudnya perluasan lahan usaha , (5). Meningkatnya jumlah kalori bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat, (6). Meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat tentang sistem pengelolaan tanaman pangan (7). Menyusun model dan membentuk institusi perekonomian rakyat yang dapat mengakses *input* produksi pangan, pasar dan informasi bisnis pangan bagi pemerataan distribusi pangan; (8) Melakukan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas pangan.

Kegiatan pokok program ini adalah: (1) Menginventarisasi dan mengevaluasi sumber daya pangan potensial serta mengembangkan keanekaragaman produksi pangan; (2) Mengoptimalkan pemanfaatan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan; (3) Memperluas lahan pertanian baru serta pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif; (4) Melakukan sosialisasi model kelembagaan ekonomi rakyat yang dapat mengakses *input* produksi pangan, pasar dan informasi bisnis pangan bagi pemerataan distribusi pangan; (5) Meningkatkan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas pangan, (6) Mengembangkan lembaga teknologi pangan, kegiatan penelitian, revitalisasi taniaga pangan dan lumbung desa, (7) Melakukan pembinaan, pengendalian sistem pemantauan ketahanan pangan, (8) Melestarikan sumber daya hayati yang merupakan sumber genetik bagi pengembangan produksi pangan, (9) Menyusun peta informasi potensi pengembangan bisnis pangan dan sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan; (10) Mengembangkan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku bisnis pangan, (11). Meningkatkan keanekaragaman produksi tanaman pangan dan hortikultura (12). Menyusun standarisasi benih dan bibit serta standarisasi teknik produksi, (13).

Meningkatkan sistem distribusi *input* produksi, (14). Melakukan sosialisasi berbagai standarisasi kepada masyarakat petani.

5. *Program Pengembangan Peternakan*

Tujuan program adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pemulihian genetika; (2) Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis ternak, 3). Mengembangkan sistem agribisnis peternakan; (4) Meningkatkan status gizi melalui pola distribusi dan konsumsi ternak, (5). Mengembangkan kelembagaan usaha peternakan masyarakat

Sasaran program ini adalah : (1) Meningkatnya jumlah dan mutu ternak; (2) Meningkatnya kepemilikan ternak dan konsumsi protein hewani per kapita, (3) Meningkatnya unit usaha industri pengolahan hasil perternakan, (4). Terciptanya sistem tata niaga yang kondusif bagi posisi tawar peternak, (5). Meningkatnya status gizi masyarakat yang bersumber dari keragaman protein hewani, (6). Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan di bidang peternakan, (7). Meningkatnya produksi dan nilai tambah usaha peternakan, (7) Berkurangnya angka kematian ternak, (8) Meningkatnya produksi pakan ternak,

Kegiatan pokok : (1) Mengembangkan inseminasi buatan, (2). Menata sistem distribusi terseleksi, (3). Meningkatkan sosialisasi dan penerapan berbagai teknologi peternakan dan pemeliharaan, (4) Memperbaiki kualitas ternak sapi Bali dan sapi Ongole, (4) Mengendalikan kesehatan hewan, (5). Merevitalisasi pemanfaatan padang pengembalaan untuk produksi ternak bibit dan bakalan, (6). Mengidentifikasi dan mengembangkan pakan ternak, (7). Meningkatkan kerjasama dengan mitra usaha peternakan dalam berbagai forum koordinasi, (8). Meningkatkan kualitas sumber daya dalam bidang peternakan, (9). Meningkatkan sarana layanan di bidang peternakan.

6. Program Pembangunan Dan Pengembangan Kehutanan

Tujuan program adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas Hutan melalui Intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan pengembangan komoditi hutan unggulan melalui pola Hutan Tanaman Industri dan Hutan Kemasyarakatan; (2) Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis kehutanan, 3) Mengembangkan sistem agroforestri; (4) Mengembangkan kelembagaan usaha hutan dan asosiasi pengolah hasil hutan.

Sasaran program ini adalah : (1) Meningkatnya jumlah dan mutu hasil hutan produksi, hutan tanaman industri dan hutan kemasyarakatan; (2) Meningkatnya kepemilikan usaha kehutanan, (3) Meningkatnya unit usaha industri pengolahan hasil hutan, (4) Terciptanya sistem tata niaga perkayuan, (5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, (6) Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan dan asosiasi pengusaha kehutanan.

Kegiatan pokok : (1) Melakukan pelatihan dan pemagangan bagi masyarakat dalam pengembangan usaha kehutanan, (2) Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan pusat pembibitan tanaman hutan unggulan, (3) Menata sistem pengembangan usaha hutan unggulan di masyarakat, (4) Meningkatkan sosialisasi dalam penerapan berbagai teknologi pengembangan tanaman hutan dan usaha hutan non kayu, (5) Mengintroduksi dan mengembangkan jenis tanaman hutan unggulan baru yang prospektif, (6) Mengendalikan bahaya kebakaran hutan, (7). Merevitalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi, (8). Mengintensifkan sosialisasi tapal batas wilayah hutan dan jenis peruntukkan kawasan hutan, (9). Meningkatkan kemitraan usaha pengembangan Hutan Tanaman Industri, (10). Meningkatkan sarana layanan di bidang kehutanan.

7. Program Pengembangan Perikanan.

Tujuan program adalah: (1) Meningkatkan jumlah hasil tangkapan dan budidaya ikan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha perikanan; (2) Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis Perikanan, (3) Mengembangkan sistem agribisnis perikanan; (4) Meningkatkan status gizi

melalui pola distribusi dan konsumsi ikan, (5) Mengembangkan kelembagaan usaha perikanan laut dan darat

Sasaran program ini adalah : (1) Tersusunnya pedoman pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya perikanan laut dan darat; (2) Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir dan petani ikan; (3) Terwujudnya peluang usaha yang kondusif bagi terlaksananya investasi swasta di bidang kelautan dan perikanan; (4) Meningkatnya jumlah dan mutu hasil perikanan; (5) Meningkatnya status gizi masyarakat yang bersumber dari keragaman protein ikan.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1). Menyusun tata ruang kelautan yang memungkinkan diciptakannya kerja sama antar kabupaten/kota dan propinsi; (2). Memberdayakan masyarakat nelayan dan petani ikan; (3). Melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan; (4). Mengoptimalkan pengembangan teknologi perikanan darat dan laut; (5). Melaksanakan Gerakan Masuk Laut (Gemala); (6). Mengendalikan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan; (7). Meningkatkan kualitas rumah tangga perikanan (RTP) melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

8. Program Peningkatan Perdagangan Produk Unggulan Daerah.

Tujuan program ini adalah (1). Meningkatkan nilai tambah atas produk-produk unggulan daerah, (2). Mendapatkan hak patent dan ISO atas produk-produk unggulan daerah, (3). Menjalin aliansi-aliansi strategis dengan pelaku-pelaku ekonomi di luar NTT.

Sasaran program ini adalah : (1). Meningkatnya promosi dagang produk-produk dagang daerah, sehingga terbentuknya pemasaran (*outlet*) perdagangan yang menguntungkan daerah; (2). Meningkatnya volume ekspor atas produk-produk unggulan daerah; (3). Meningkatnya jumlah komoditas unggulan daerah yang berpeluang mendapatkan hak patent dan ISO, (4). Meningkatnya investasi di bidang pengembangan komoditas unggulan daerah, (5). Meningkatnya jaringan kerjasama antar pelaku ekonomi di NTT dan di luar NTT

Kegiatan pokok dalam program ini, adalah (1). Melakukan sosialisasi dan fasilitasi pengurusan hak patent dan ISO, (2). menginventarisasi komoditas unggulan di daerah, (3). Meningkatkan pengawasan standart mutu, (4). Meningkatkan keterampilan kerja melalui pelatihan, pendampingan dan magang, (5). Meningkatkan promosi dagang di dalam dan ke luar negeri, (6). Menciptakan dan mengembangkan prasarana promosi dagang baik di dalam daerah maupun di luar daerah, (7). Membina dan mengembangkan jaringan kerja sama dagang antar pelaku ekonomi di dalam dan di luar daerah.

9. Program Pengembangan Kerjasama Antar Wilayah Dan Peningkatan Promosi Pariwisata.

Tujuan program ini adalah : (1). Menciptakan kondisi yang memungkinkan kerjasama antar daerah sehingga dapat mendorong pembangunan kepariwisataan; (2). Mengembangkan jenis-jenis obyek wisata sehingga terciptanya kondisi bagi pengembangan industri pariwisata; (3). Meningkatkan kualitas daya tarik wisata baik wisman maupun wisnus; (4). Memberikan rekomendasi bagi pembangunan infrastruktur kepariwisataan.

Sasaran program ini adalah : (1). Meningkatnya arus dan jumlah kunjungan wisata; (2). Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daerah baik secara langsung (*direct income effect*) dan secara tidak langsung (*indirect and induced income effect*); (3). Meluasnya jaringan kerjasama pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri; (4). Terwujudnya NTT sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) potensial.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah : (1). Melaksanakan kegiatan kepariwisataan berbasis sapta Pesona Wisata; (2). Mengembangkan potensi wisata di NTT melalui berbagai peristiwa dan atraksi wisata; (3). Menjadikan potensi wisata di Nusa Tenggara Timur bernilai ekonomis dan sosial; (4). Mengembangkan dan mempromosikan obyek-obyek wisata bahari, alam dan budaya melalui media cetak dan elektronik; (5). Melakukan studi pendalaman struktur industri pariwisata; (6). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

kepariwisataan; (7) Melakukan koordinasi perencanaan pengembangan kepariwisataan antardaerah dan wilayah.

10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga (IKRT)

Tujuan program ini adalah (1). Menciptakan IKRT unggulan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. (2). Mengembangkan IKRT berbasis potensi daerah yang memiliki peluang pasar. (3). Menciptakan aksesibilitas IKRT terhadap lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank. (5) Menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap produk komoditas industri lokal.

Sasaran program ini adalah (1) Meningkatnya jiwa wirausaha pada setiap pelaku ekonomi IKRT (2). Terwujudnya IKRT unggulan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah; (3). Meningkatnya jumlah dan kualitas komoditas sesuai kebutuhan/permintaan pasar. (4). Terciptanya keberpihakan dan keikhlasan lembaga keuangan terhadap pengembangan IKRT. (5) Meningkatnya kesadaran yang bertanggungjawab dari IKRT terhadap pemanfaatan kredit perbankan. (6). Terciptanya iklim kemitraan usaha antara pelaku industri lokal (IKRT) dengan pelaku industri luar NTT .

Kegiatan pokok program ini adalah (1) meningkatkan pelatihan dan pemagangan yang mendukung peningkatan kemampuan kelembagaan IKRT(2) mendorong penyediaan pusat promosi/penjualan hasil IKRT didesa (3) mendirikan dan mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil IKRT didalam dan diluar NTT yang mudah terjangkau oleh pembeli (4). Menumbuhkembangkan berbagai industri jasa (5). meningkatkan jumlah dan skala usaha IKRT; (6). Melakukan bimbingan dan pendampingan bagi pengembangan usaha industri rumah tangga; (7) Menciptakan regulasi/peraturan yang dapat mendorong berkembangnya IKRT; (8) mengkaji dan meninjau peraturan dan prosedur perbankan yang kurang berpihak kepada masyarakat terutama IKRT; (9) mendorong tumbuhnya asosiasi IKRT secara mandiri.

11. Program Pengembangan Investasi Dan Penguatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Tujuan program adalah (1). Meningkatkan dan mengembangkan investasi (2). Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah, (3). Meningkatkan kapasitas kebijakan fiskal daerah, (4). Merevitalisasi perangkat peraturan investasi.

Sasaran program ini adalah (1). Tersedianya perangkat peraturan perinjinan dan kemudahan investasi pemerintah, PMA, PMDN dan non fasilitas; (2). Terciptanya kondisi bagi pelaksanaan perluasan pungutan pajak dan retribusi; (3). Tersedianya perangkat peraturan pemungutan pajak dan retribusi; (4). Tersedianya data dan informasi bagi pengembangan investasi, (5). Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan dan kualitas layanan investasi.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Mendata dan memetakan obyek-obyek pajak yang dapat mendorong kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP); (2). Merevitalisasi pungutan retribusi; (3). Menata kembali berbagai peraturan tentang pungutan pajak dan retribusi; (4). Mengembangkan sistem pelayanan investasi satu pintu; (5). Menata kelembagaan pungutan pajak dan retribusi, (6). Melakukan promosi investasi melalui berbagai sarana promosi, (7). Menata kembali daya tarik investasi unggulan daerah, (8). Mengembangkan berbagai studi kelayakan investasi, (9). Mengembangkan dan mengefektifkan sumber-sumber pendapatan daerah non-pajak dan retribusi melalui optimalisasi fungsi pelayanan jasa kelembagaan pemerintah.

12. Program Peningkatan Profesionalitas Dan Kinerja BUMD

Tujuan program ini (1). Meningkatkan kemampuan manajemen BUMD sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja BUMD, (2). Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha BUMD, (3). Meningkatkan kontribusi BUMD bagi penerimaan daerah, (4). Meningkatkan kinerja BUMD melalui layanan publik.

Sasaran program ini adalah : (1). Meningkatnya kemampuan manajemen BUMD (2). Meningkatnya kinerja dan profesionalitas BUMD; (3) Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah; (4). Terwujudnya BUMD yang memiliki spesifikasi kerja dan daya saing tinggi, (5). Terjalinnya kerja sama antara BUMD dan sesama pelaku ekonomi lainnya dalam berbagai bidang kegiatan/usaha, (6). Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengelola BUMD.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Menata kembali sistem rekrutmen aparat BUMD berdasarkan kaidah-kaidah profesionalitas, (2). Melakukan pendidikan, pelatihan dan pemagangan, (3). Meningkatkan fungsi manajemen dan kelembagaan BUMD, (4) Menciptakan dan mencari peluang usaha yang prospektif dan spesifik, (5). Melakukan kerjasama melalui pola kemitraan usaha dengan para pelaku ekonomi lainnya baik di dalam maupun di luar daerah, (6). Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pengembangan usaha.

13. Program Pembangunan Dan Pengembangan Pertambangan

Tujuan program ini adalah (1). Menciptakan kebijakan dan regulasi pertambangan, energi dan air bawah tanah yang berbasis lingkungan; (2). Meningkatkan skala dan nilai tambah produk pertambangan, energi dan air bawah tanah; (3). Meningkatkan pemenuhan kebutuhan produk pertambangan, energi dan air bawah tanah.

Sasaran program ini adalah : (1). Tersusunnya rencana dan kebijakan serta regulasi di bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (2). Meningkatnya kemampuan Pelaku pertambangan, energi dan air bawah tanah; (3). Terwujudnya peningkatan investasi di bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (4) Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pertambangan, energi dan air bawah tanah; (5) Terwujudnya pemanfaatan potensi pertambangan, energi dan air bawah tanah yang ramah lingkungan.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Melakukan pemutakhiran data dan informasi dibidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (2). Menyusun

kebijakan dan regulasi bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (3). Melakukan pendampingan usaha pertambangan, energi dan air bawah tanah; (4). Meningkatkan promosi bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah; (5) Menyediakan sarana dan prasarana pertambangan, energi dan air bawah tanah; (6) Meningkatkan pemanfaatan potensi pertambangan, energi dan air bawah tanah (7) Mengembangkan teknologi pertambangan, energi dan air bawah tanah; (8) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana, kebijakan dan regulasi dibidang pertambangan, energi dan air bawah.

3.2. PRASARANA EKONOMI

Prasarana ekonomi merupakan salah satu prasarana dasar bagi pembangunan ekonomi produksi guna meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Sebagai salah satu sub-ordinasi dari pembangunan ekonomi daerah, maka pembangunan dan pengembangan prasarana ekonomi Lingkup prasarana ekonomi meliputi; pertanahan, prasarana perhubungan, prasarana permukiman dan prasarana sumber daya air.

Program pembangunan bidang pembangunan sarana dan prasarana ekonomi merupakan pengejawantahan dari upaya mencapai peran yang optimal dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang optimal dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan, sasaran dan kegiatan pokok masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pertanahan

Tujuan program adalah (1) Meningkatkan kepastian hak atas tanah mendukung kegiatan investasi swasta dan kegiatan usaha masyarakat, (2) Meningkatkan layanan informasi pertanahan. (3) Meningkatkan kemampuan kelembagaan, kualitas dan jangkauan layanan pertanahan.

Sasaran program ini adalah (1) Meningkatnya kepastian status hak atas tanah, (2) Menikatnya layanan informasi pertanahan, (3) Meningkatnya kemampuan kelembagaan, kualitas dan jangkauan layanan pertanahan.

Kegiatan Pokok Program ini adalah (1) Meningkatkan kegiatan sertifikasi tanah, (2) Mengembangkan sistem informasi dan administrasi pertanahan, (3) Meningkatkan kualitas aparatur pertanahan, (4). Mengembangkan sarana dan prasarana peralatan yang memadai, (5) Mendukung upaya keterpaduan dan perdamaian penyelesaian masalah tanah.

2. Program Pengembangan Perumahan Rakyat

Tujuan program ini adalah; (1) Menyediakan rumah sehat baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat; (2) Meningkatkan sistem pengembangan rumah sehat yang bertumpu pada kemampuan dana masyarakat.

Sasaran program ini adalah; (1) Meningkatnya penyediaan rumah sehat terutama di pedesaan dan wilayah kumuh perkotaan, (2) Meningkatnya penyediaan rumah sehat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, (3) Berkembangnya pola kemitraan pengembangan rumah sehat.

Kegiatan pokok adalah (1). Membangun dan mengembangkan rumah sehat di wilayah pedesaan dan perkampungan kumuh di perkotaan, (2) Mengembangkan Skim kredit murah dan mudah. (3) Mengembangkan kemitraan kerja diantara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan rumah sehat.

3. Program Pembangunan dan Pengembangan Permukiman

Tujuan program ini adalah; (1) Meningkatkan konsentrasi pemukiman untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi produksi. (2) Meningkatkan tata permukiman sesuai tata ruang, (3) Meningkatkan kapasitas jaringan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan dan pedesaan.

Sasaran program ini adalah : (1) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman (2) Meningkatnya kawasan-kawasan permukiman baru sesuai tata ruang, (3) Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Membangun dan mengembangkan permukiman pada kawasan-kawasan potensial, (2) Memperbaiki dan menyediakan prasarana dan sarana pemukiman di perkotaan dan pedesaan, (3) Meningkatkan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman, (4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan, prasarana, sarana permukiman berbasis masyarakat, (5) Merevitalisasi standar dan peraturan jasa konstruksi dan jasa konsultasi.

4. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tujuan program ini adalah : (1) Mempertahankan tingkat pelayanan prasarana jalan dan jembatan. (2) Meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan prasarana jalan dan jembatan ke dan dari sentra-sentra produksi. (3) Membuka ruas jalan baru sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Sasaran program ini adalah : (1) Meningkatnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dalam pemulihian ekonomi (2) Tersedianya prasarana jalan dan jembatan yang berkaitan dengan landasan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan (3) Terciptanya sistem jaringan jalan yang terpadu sesuai fungsi jalan (arteri, kolektor, lokal termasuk jalan desa).

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan melibatkan masyarakat; (2) Meningkatkan kondisi jalan dan penggantian jembatan; (3) Membangun jaringan jalan dan jembatan; (4) Melakukan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan; (5). Mendorong dan memfasilitasi masyarakat membangun jalan dan jembatan desa pada sentra-sentra produksi.

5. Program Peningkatan Fasilitas dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan serta Peningkatan Fasilitas Penyeberangan.

Tujuan program ini adalah : (1) Memperlancar arus lalu lintas manusia,

barang dan jasa serta menurunkan angka kecelakaan di jalan raya. (2) Memperlancar mobilitas arus penumpang dan barang pada setiap pelabuhan penyeberangan.

Sasaran program ini adalah : (1) Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas jalan raya (2) Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas (3) Meningkatnya jumlah arus penumpang dan barang (4) Meningkatnya kemampuan aparatur pengawas dan pengendali. (5). Bertambahnya fasilitas pelabuhan penyeberangan

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Mengintesifkan pembinaan awak kendaraan umum. (2) Meningkatkan kemampuan teknis aparatur lalu lintas Angkutan Jalan Raya. (3) Menertibkan sarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas/angkutan darat. (4) Meningkatkan prasarana dan sarana angkutan penyeberangan yang memadai. (5). Meningkatkan kemitraan kerja antara pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas jalan dan penyeberangan.

6. Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, Keselamatan Pelayaran dan Peningkatan Sarana Angkutan Laut.

Tujuan program ini adalah:(1) Meningkatkan kelancaran mobilitas arus penumpang dan barang di setiap pelabuhan laut (2) Meningkatkan jumlah dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan. (3) Menjamin keselamatan dan penegakan hukum pelayaran.

Sasaran program ini adalah (1) Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan laut/pelayaran yang memadai bagi masyarakat (2) Meningkatnya pergerakan arus penumpang dan barang pengguna jasa perhubungan laut/pelayaran (3) Menurunnya tingkat hambatan dan kecelakaan dalam pelayaran.

Kegiatan pokok program adalah : (1) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana pelabuhan. (2). Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan sarana angkutan laut. (3). Penegakan aturan dan hukum pelayaran (4). Menertibkan prasarana angkutan laut. (5) Menginventarisir dan mengkaji

ulang kondisi pelabuhan laut yang tingkat risiko pelayarannya tinggi. (6). Mengoperasikan pelayaran perintis untuk melayani trayek-trayek yang dapat menjangkau dan melayani kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, (7). Meningkatkan mutu aparatur pelayaran.

7. Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Udara, Keselamatan Penerbangan dan Peningkatan Sarana Penerbangan.

Tujuan program ini adalah (1) Meningkatkan kelancaran arus penumpang, barang dan jasa (2). Meningkatkan fasilitas pelabuhan udara. untuk menjamin keselamatan penerbangan (3) Menjamin keselamatan penerbangan.

Sasaran program ini adalah : (1) Tersedianya fasilitas pelabuhan udara yang memadai. (2) Terwujudnya pelayanan angkutan udara yang menjamin keselamatan penumpang (3) Meningkatnya arus penumpang, barang dan jasa.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Memelihara dan meningkatkan fasilitas bandar udara. (2) Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana angkutan udara. (3) Meningkatkan pelayanan penerbangan perintis (4) Menegakkan peraturan penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan.(5). Meningkatkan kualitas aparatur di bidang jasa angkutan udara.

8. Program Pengembangan Meteorologi dan Geofisika.

Tujuan program ini adalah : Memprakirakan perubahan iklim dan gelaja alam lainnya.

Sasaran program ini adalah Tersedianya data dan informasi yang akurat yang mendukung pembangunan sektor lain.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Menyediakan sarana dan parasarana yang memadai. (2) Mengembangkan SDM (3) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dengan daya jangkau yang luas.

9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

Tujuan program ini adalah : menunjang tercapainya Peningkatan produksi, produktivitas dan ketahanan pangan serta pengembangan agribisnis dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan jaringan irigasi.

Sasaran program ini adalah : (1) Terselenggaranya penataan kembali tugas dan peran pemerintah propinsi/kabupaten dan kota dalam pengelolaan irigasi berdasarkan pemberian kewenangan; (2) Meningkatnya peran lembaga P3A melalui pembentukan gabungan/induk P3A untuk mengelola jaringan irigasi sampai ke tingkat jaringan utama.

Kegiatan pokok adalah (1) Meningkatkan mutu SDM pengelolaan jaringan irigasi (2) Melakukan penataan ulang tugas dan fungsi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten maupun kota dalam rangka menciptakan kemandirian pengelolaan jaringan irigasi P3A; (3) Memberdayakan P3A melalui pendampingan oleh perguruan tinggi dan LSM, (4) Memberdayakan organisasi petani lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, (5) Mengkaji kembali sistem pembiayaan pengelolaan irigasi (operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan); (6) Mengembangkan jaringan irigasi sesuai kebutuhan.

10. Program Konservasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air.

Tujuan program adalah : (1) Meningkatkan pemanfaatan dan produktivitas sumber daya air (2) Meningkatkan konservasi sumber-sumber air.

Sasaran program ini adalah : (1) terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang efisien dan efektif; (2) meningkatnya pemanfaatan dan produktivitas sumber air; (3) terlindungnya sumber-sumber air.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Meningkatkan mutu SDM dalam pengelolaan sumberdaya air; (2) Menata kembali tugas, peran dan tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah propinsi/kabupaten/ kota, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber air; (3) Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan di bidang pengembangan sumber daya air; (4) Membentuk jaringan kelembagaan pengelolaan data hidrologi; (5) Mengkaji kembali

karakteristik satuan wilayah sungai; (6) Meningkatkan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; (7) Memelihara, memperbaiki, dan mengembangkan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta peranan penampung air yang dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan air irigasi, air minum; (8) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya air; (9) Membentuk badan pengelolaan sumberdaya air baku; (10) Melakukan identifikasi dan evaluasi jaringan irigasi.

11. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Tujuan program ini adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi serta daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran program ini adalah : (i) Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal, efisien dan berkelanjutan; (2) Terlindungnya kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploratif; (3) Menurunya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan mutu SDM dibidang pengelolaan lingkungan hidup; (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup : (3) Mengkaji kembali kebijakan pengelolaan, konservasi, preservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; (4) Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara optimal; (5) Melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi dalam kawasan hutan, lahan kritis serta lahan bekas pertambangan (6) Menyusun dan menerapkan pedoman tentang valuasi ekonomi lingkungan dan sumberdaya alam; (7) Menetapkan status pengelolaan kawasan konservasi (cagar alam, taman wisata alam, taman nasional, hutan lindung, sumber air tanah dan mata air); (8) Mengembangkan teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan; (9) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (*eco – tourism*).

12. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah.

Tujuan program ini adalah (1)melestarikan fungsi lingkungan hidup baik daya dukung maupun daya tampung; (2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Sasaran program ini adalah: (1) Terwujudnya upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup; (2)Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Meningkatkan SDM dan kemampuan kelembagaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; (2) mengembangkan teknologi pengelolaan sumber daya air, hutan dan lahan yang ramah lingkungan termasuk teknologi lokal/tradisional.; (3) Meningkatkan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak; (4) Menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan daerah, serta menyiapkan model dan pedoman audit lingkungan; (5) Mengembangkan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah industri; (6) Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara kontinue terhadap standar mutu lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

13. Program Pembinaan dan Pengelolaan Daerah Pesisir dan Laut

Tujuan program ini adalah : mengelola dan mengembangkan sumber daya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan lestari.

Sasaran program ini adalah: (1) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara optimal dan lestari sesuai tata ruang kawasan; (2) Terciptanya keterpaduan sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut antara propinsi kabupaten/kota; (3) Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Meningkatkan mutu SDM di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut; (2) Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang ;(3)

Mengembangkan zonasi pesisir dan laut; (4) Menetapkan dan memanfaatkan ruang wilayah laut lintas kabupaten/kota; (5) Membangun sistem database keanekaragaman hayati laut; (6) Menetapkan dan mengelola kawasan-kawasan konservasi pesisir dan laut (taman wisata alam laut) berbasis masyarakat; (7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya penyelamatan, perlindungan dan pemanfaatan lestari sumber daya pesisir dan laut; (8) Mengatur pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 – 12 mil; (9) Memelihara dan mengembangkan obyek wisata bahari.

14. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Tujuan program ini adalah : Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pelestarian, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran program ini adalah : Meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan serta pemantapan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat secara bertanggung jawab.

Kegiatan pokok program ini adalah: (1) menginventarisasi, mengidentifikasi dan mengintegrasikan nilai, norma dan kearifan lokal kedalam peraturan hukum dibidang lingkungan hidup; (2) Melakukan pelatihan dan pemagangan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan, (3) Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup; (4) Mengembangkan kemitraan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam, (5) Memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam; (6) Menguatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam; (7) Meningkatkan upaya perlindungan hak-hak adat masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, (8) Memanfaatkan lembaga adat dalam kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam.

B. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RAKYAT

1. UMUM

Memasuki era pelaksanaan otonomi daerah maka paradigma pembangunan pendidikan rakyat di propinsi NTT diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat NTT secara bertahap dan berkelanjutan, berdasarkan kemampuan daerah dan berbagai sumberdaya pendidikan yang dimilikinya.

Menyadari penting dan strategisnya peranan pendidikan dalam mencerdaskan dan memajukan manusia dan masyarakat NTT, maka pemerintah NTT menetapkan pendidikan rakyat sebagai salah satu prioritas.

Seiring dengan prinsip kontekstual dan berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah, maka paradigma pembangunan pendidikan di NTT telah mengalami perubahan : dari manajemen pendidikan bersifat normatif, dogmatis (*uniform*) menjadi manajemen pendidikan bersifat misioner dan berbasis sekolah (*school based management*). Perubahan paradigma pendidikan ini memiliki kesejajaran nilai dengan kerangka kerja pembangunan pendidikan rakyat yang mengutamakan aspek kognitif (kecerdasan), afektif (perilaku), psikomotorik (keterampilan).

Sebagai program prioritas maka pembangunan pendidikan rakyat di NTT diharapkan dapat meningkatkan kualitas anak didik pada semua strata pendidikan, agar dapat memiliki keunggulan komparatif dan berdaya saing tinggi baik lokal, nasional maupun global, sehingga mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan berdampak pula pada penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan rakyat di NTT pada saat ini masih dihadapkan dengan masalah : (1) Masalah kualitas pendidikan rakyat, dimana jumlah penduduk yang berkualifikasi tamat SD mencapai 75,21 % dari total jumlah penduduk NTT yang berjumlah 3.706.536. Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan penduduk yang berkualifikasi SLTP yang

mencapai 7,56 %, SLTA yang mencapai 2,72 %; (2) Rendahnya mutu pendidikan formal di NTT, dengan indikator selama lima tahun terakhir, NEM rerata SD hanya mencapai 5,00-6,00; SLTP 5,52-5,80 dan SMU/SMK hanya mencapai 5,38 (SMU) dan 5,47 (SMK); (3) Rendahnya daya saing lulusan SMU/SMK secara nasional, yang ditunjukkan dengan banyaknya anak didik NTT yang gagal pada saat mengikuti seleksi UMPTN pada Universitas favorit di pulau Jawa; (4) Terbatasnya kesempatan belajar yang ditunjukkan dengan angka partisipasi murni, dimana masih terdapat sekitar 10,61 % anak usia SD yang belum menikmati SD dan akan semakin besar bila ditambah dengan yang putus sekolah mencapai 3,83 %; Sementara itu angka partisipasi murni SLTP hanya mencapai 45,01 % ditambah yang putus sekolah 4,11 % dari total penduduk NTT; (5) Masih adanya ketimpangan rasio antara jumlah sekolah dan guru yang tidak sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar; (6) Rendahnya tingkat pendidikan formal guru SD, sehingga kurang mampu mengembangkan dan mentransformasi ilmu pengetahuan kepada anak didik; (7) Terbatasnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan tenaga pendidik yang bermutu dan kurangnya bantuan bea siswa bagi anak didik yang berprestasi dari keluarga ekonomi lemah; (8) Belum transparannya manajemen pendidikan, mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pembangunan pendidikan tidak efektif dan efisien dimana terjadi pemborosan dan kebocoran dana pendidikan.

Berbagai masalah tersebut akan dapat teratasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan pendidikan rakyat di NTT tahun 2001 – 2004.

2. ARAH PEMBANGUNAN

Arah pembangunan pendidikan rakyat di NTT tahun 2001 – 2004 adalah :

- (1) Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menyediakan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti buku pegangan guru, siswa, laboratorium dan perlengkapan lain yang diperlukan agar proses pembelajaran yang bermutu dapat dicapai. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara selain diupayakan oleh pemerintah, juga diupayakan dengan cara mendorong guru dan anggota masyarakat lainnya untuk menulis materi pembelajaran yang bernuansa lokal agar mudah dipahami oleh siswa;
- (2) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar dengan mempertimbangkan aspek geografis, status sosial ekonomis, dan jender melalui pembukaan sekolah di tempat-tempat terpencil seperti daerah perdesaan dan mendorong wanita untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan;
- (3) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dengan cara membuka sekolah dan ruang belajar yang menampung semua rakyat NTT usia sekolah;
- (4) Meningkatkan mutu tenaga kependidikan dengan cara memberikan kesempatan kepada semua tenaga kependidikan untuk menempuh jenjang pendidikan minimal sesuai syarat yang dituntut dan membaharui sistem rekrutmen tenaga kependidikan agar tenaga yang diterima sesuai kualifikasi yang diperlukan;
- (5) Memberikan beasiswa dan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain agar semua tenaga kependidikan dapat menempuh pendidikan yang diperlukan;
- (6), Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dalam bidangnya;
- (7). Merevisi sistem administrasi kenaikan pangkat dan jabatan;
- (8) Memperbaiki kurikulum lokal dengan cara membaharunya sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (9) Meningkatkan manajemen pendidikan dengan cara mengikutsertakan semua komponen masyarakat dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pendidikan;
- (10) Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan pendidikan swasta dengan cara memberikan bantuan yang sama kepada sekolah swasta dan

negeri; (11) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan dengan cara meningkatkan keterlibatan masyarakat dan membiayai, merencanakan, mengevaluasi pendidikan; (12) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

Oleh karena itu, program pembangunan pendidikan rakyat di NTT tahun 2001 – 2004 adalah sebagai berikut :

3. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RAKYAT

1. Program Pembangunan Pendidikan Dasar

Tujuan program: (1) Memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak NTT dengan memperbesar daya tampung SD/MI dan SLTP/MTs terutama di pedesaan, daerah tertinggal serta diperkotaan; (2) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak dari kelompok kurang mampu dan keluarga miskin dari daerah terpencil; (3) Meningkatkan mutu pendidikan dasar baik SD/MI maupun SLTP/MTs, (4) Menerapkan manajemen pendidikan dasar secara efektif; dan (5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dasar.

Sasaran program ini adalah : (1). Meningkatnya daya tampung SD/MI dan SLTP/MTs sampai batas maksimal (100%); (2). Meningkatnya mutu pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs, (3). Meningkatnya perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak, sehingga memperbesar angka partisipasi kasar (APK); (4). Meningkatnya sistem dan management pendidikan dasar secara efektif, profesional, akuntabel, demokratis dan terdesentralisasi; (5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SD/MI dan SLTP/MTs swasta. (6). Terwujudnya aspek pemerataan guru dan sarana pendidikan baik di kota maupun di desa.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1) Mengawasi program perluasan pendidikan pada jenjang pendidikan SD,SLTP, dan SLB serta pendidikan di luar sekolah; 2) Melaksanakan pemerataan memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan daerah tertinggal, seperti; program guru kunjung/sistem tutorial, SD pamong, SD terpadu, kelas jauh dan SLTP terbuka, serta pendidikan SLB; 3) Menyempurnakan kurikulum pendidikan dasar yang berbasiskan pada kebutuhan dan potensi daerah (muatan lokal) demi pencapaian tujuan pendidikan nasional yang mampu meningkatkan kreatifitas guru. 4) Menyediakan buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat peraga pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS), ilmu pengetahuan alam (IPA) dan matematika, perpustakaan dan laboratorium; 5) Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap proses belajar mengajar melalui kegiatan pemetaan mutu sekolah, meningkatkan kesejahteraan pendidik, pengajar dan penilaian proses dan hasil belajar, serta pengembangan sistem dan tolak ukur penilaian mutu pendidikan SD, SLTP dan SLB; 6). Membayai pendidikan formal lanjutan (penyetaraan) bagi pada guru SD/MI dan SLTP/MTs, serta menyelenggarakan penataran secara berkelanjutan; 7). Menyelenggarakan lomba bidang studi dan karya tulis bagi siswa, lomba penulisan buku pelajaran dan karya ilmiah bagi guru dan lomba sekolah sehat; 8). Melaksanakan pemilihan siswa dan guru teladan; 9). Menyelenggarakan sistim ujian catur wulan regional, 10). Melaksanakan tertib administrasi pendidikan.

2. *Program Pembangunan Pendidikan Menengah (SMU/SMK, MA)*

Tujuan program ini adalah : 1). Meningkatkan mutu dan daya saing, 2). Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, 3). Meningkatkan relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan, 4). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan SMU/SMK dan MA.

Sasaran program ini adalah : (1). Meningkatnya mutu dan daya saing *output* pendidikan menengah, 2). Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, (3). Meningkatnya relevansi, efisiensi dan standart mutu

pendidikan, (4). Meningkatnya jumlah dan mutu sarana pendidikan, (5). Meningkatnya mutu prasana dan kualifikasi kependidikan, (6). Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan sekolah kejuruan yang dapat memasuki pasar tenaga kerja, (7). Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan SMU/SMK dan MA.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1). Meningkatkan mutu profesionalisme tenaga pendidik melalui peningkatan kualifikasi pendidik melalui pelatihan, kursus dan program penyetaraan pendidik. (2). Mengembangkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi baku yang bermutu; 3) Mengembangkan lomba menulis karya ilmiah baik untuk guru maupun untuk siswa; 4) Menggerakkan penulisan bahan ajar/buku ajar yang bermutu berdasarkan kurikulum dan pengembangannya disesuaikan dengan kondisi lokal; (5). Mengembangkan kurikulum sekolah unggul, (6). Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar melalui pemberian beasiswa kepada anak terlantar dan miskin, (7). Menyusun sistem dan mekanisme kerjasama antara sekolah dan dunia usaha/industri, (8). Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berprospek lebih luas dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan nasional dan global masa depan, (9). Mendorong masyarakat untuk meningkatkan sumbangan finansial terhadap pembangunan pendidikan (BP3), (10). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun sekolah di daerah-daerah yang membutuhkan, (11). Mengembangkan sistem management berbasis sekolah (*school based management*), (12). Mengembangkan sistem data dan informasi SMU dan SMK, (13). Mengembangkan sistem perencanaan PBM SMU dan SMK baku per bidang studi, (14). Mengembangkan sistem penilaian cawu regional SMU dan SMK yang baku berbidang studi, (15). Mengembangkan sistem kerja sama antar sekolah.

3. Program Pembangunan Pendidikan Tinggi

Tujuan Program ini adalah : (1). Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan; 2). Meningkatkan perluasan kesempatan belajar; 3). Meningkatkan

manajemen pendidikan; 4). Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Sasaran program ini adalah : 1). Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi, 2). Tertatanya manejemen pendidikan tinggi yang efisien dan efektif, 3). Meratanya kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, 4). Meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang dapat ditampung dalam dunia kerja; 5). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan tinggi.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Meningkatkan mutu tenaga akademik melalui pendidikan Strata 2, Strata 3 dan pendidikan jangka pendek lainnya, (2). Mendorong penulisan bahan ajar, buku ajar yang bermutu, (3). Meningkatkan perluasan kesempatan belajar bagi lulusan SMTA untuk mengikuti pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa, (4). Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi, (5). Meningkatkan kemitraan kerja antara perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.

4. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

Tujuan Program ini adalah : (1). Memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak atau belum memperoleh pendidikan formal; (2). Memberikan pengetahuan dasar dan ketrampilan berusaha kepada masyarakat agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya maupun anggota keluarganya. 3). Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan luar sekolah.

Sasaran program : 1). Terlanyaninya kegiatan bagi masyarakat yang tidak atau belum menikmati pendidikan formal; 2). Tersedianya lembaga pendidikan luar sekolah, 3). Tersedianya tenaga tutorial dan sarana yang memadahi; 4). Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 5). Meningkatnya pemberdayaan sanggar atau pusat-pusat kegiatan pembelajaran masyarakat.

Kegiatan pokok : 1). Mempercepat penuntasan buta aksara khususnya bagi penduduk usia 10 - 44 tahun, 2). Membangun dan mengembangkan taman bacaan dan perpustakaan yang berada di perkotaan dan di perdesaan, 3). Meningkatkan dan memperluas jenis PLS, 4). Meningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan luar sekolah melalui Kejar paket A dan B. 5). Mengembangkan modul pembelajaran bagi PLS, 6). Meningkatkan pengetahuan bagi tutorial PLS terutama di perdesaan, 7). Mengembangkan lembaga tutorial PLS terutama di perdesaan, 8). Melakukan pembinaan dan pengawasan PLS terutama di perdesaan, 9). Mengembangkan kemitraan kerja antara pemerintah dunia usaha dan lembaga sosial lainnya dalam menyelenggarakan PLS.

5. *Program Revitalisasi Manajemen Pendidikan*

Tujuan program ini adalah : Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program pendidikan baik antar jenjang, jalur maupun antar daerah.

Sasaran program ini adalah : Tertatanya sistem sinkronisasi, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program pembangunan pendidikan.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1). Mengembangkan kurikulum muatan lokal melalui kemitraan kerja diantara komponen pendidikan, (2). Mengembangkan penerapan sistem instruksional pada setiap jenjang pendidikan, (3). Mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan evaluasi Cawu Regional pada setiap jenjang pendidikan, (4). Mengembangkan kelompok kerja guru per jenjang, per bidang studi dan per wilayah. (5). Melakukan studi pengkajian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, (6). Meningkatkan pengendalian pembangunan pendidikan antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota serta antar kabupaten/kota yang terdiri dari : (i). Alokasi tenaga kependidikan, (ii). Sarana dan prasarana kependidikan, (iii). Kegiatan Belajar-Mengajar.

6. Program Pengembangan, Penyebarluasan dan Pemanfaatan IPTEK.

Tujuan program ini adalah : (1). Meningkatkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terobosan dalam rangka pemanfaatan IPTEK, (2). Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian dan pengkajian, (3). Mendorong pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengkajian, (4). Meningkatkan kemampuan peneliti baik yang berada di pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat, (5). Memanfaatkan peluang dan fasilitas pemerintah pusat dalam melakukan penelitian dan pengkajian IPTEK terobosan di daerah

Sasaran program : (1). Meningkatnya kemampuan lembaga LITBANG dalam melakukan penelitian dan pengkajian IPTEK terobosan, (2). Terwujudnya pendayagunaan IPTEK yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa untuk memecahkan berbagai masalah.

Kegiatan pokok : (1). Meningkatkan koordinasi pusat-pusat penelitian dalam rangka pemanfaatan hasil penelitian yang sudah ada, (2). Membangun dan mengembangkan sistem informasi penelitian, (3). Standarisasi kualifikasi peneliti dan metodologi penelitian serta manajemen penelitian. (4). Mengupayakan pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD), (5). Mengembangkan kajian-kajian sosial budaya terhadap hasil-hasil penelitian IPTEK sebagai masukan bagi perumusan kebijakan pemerintah, 6). Membina organisasi profesi ilmiah untuk melakukan sertifikasi dan akreditasi profesional sesuai standart internasional, 7). Mengembangkan penelitian dan evaluasi kerja melalui mekanisme teknis terbuka; 8). Mengembangkan asisten teknis kepada usaha kecil, koperasi dan wirausaha tradisional; 9). Meningkatkan kemandirian layanan teknologi dan keunggulan inovasi teknologi bangsa sendiri agar dapat meningkatkan daya saing dunia usaha dan masyarakat; 10). Memperluas kemitraan penelitian termasuk menyederhanakan proses kemitraan untuk meningkatkan keefektifan dan keleluasaan dalam berhubungan dengan dunia usaha.

C. PEMBANGUNAN KESEHATAN RAKYAT

1. U M U M

Pembangunan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif agar dapat diwujudkan perbaikan terhadap kualitas manusia dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dari hasil analisis situasi pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya kekuatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut di atas adalah; adanya institusi dan program pendidikan dan pelatihan yang dapat menjamin peningkatan kemampuan petugas kesehatan, tersedianya tenaga medis dan bidan sampai ke desa, adanya sarana pelayanan kesehatan sampai ke desa, Adanya jaringan pelayanan kesehatan termasuk sistem rujukan dan pengalaman kebersamaan dalam mengatasi masalah kesehatan akibat berbagai bencana pada masyarakat, kemauan dan kesediaan untuk memberikan bantuan secara iklas serta adanya kesepakatan bersama seluruh jajaran kesehatan Nusa Tenggara Timur untuk menyukseskan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan.

Masalah utama kesehatan di NTT adalah kondisi derajat kesehatan masyarakat masih tergolong rendah ditandai oleh tingginya angka kematian kasar (AKK), angka kematian ibu (AKI), angka kematian balita (AkBal) dan angka kematian bayi (AKB). AKK Nusa Tenggara Timur pada tahun 1998 sebesar 8,7% per 1.000 kelahiran, lebih tinggi dari AKK nasional sebesar 7,5% per 1.000 kelahiran. Sementara AKB sebesar 48 per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 41 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Nusa Tenggara Timur adalah 860 per 100.000 kelahiran hidup, hampir tiga kali lipat dari angka nasional yang mencapai 373 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AkBal di Nusa Tenggara Timur mencapai 82 per 1.000 balita dan angka nasional mencapai sebesar 81 per 1.000 balita.

Penyebab tingginya angka kematian tersebut, terutama masih disebabkan oleh tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular/infeksi, kurang gizi

terutama pada kelompok balita, rendahnya cakupan pelayanan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan balita.

Tantangan pokok yang dihadapi pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Timur adalah kemiskinan. Kemiskinan yang absolut, akan mengancam upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dalam pembangunan kesehatan. Tantangan pembangunan kesehatan yang lain adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan, berpengaruh pada penurunan alokasi anggaran sektor kesehatan. Disamping itu daya beli masyarakat akan makin menurun termasuk kemampuan masyarakat untuk membiayai pelayanan kesehatannya

Kendala pembangunan kesehatan yang dihadapi di Nusa Tenggar Timur adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang mencapai 75,21% yang berpendidikan SD ke bawah menurut data tahun 1998, kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur yang sebagian berbukit dan gunung dengan tingkat kemiringan yang tinggi, menyulitkan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, jumlah tenaga medis seperti dokter dan tenaga non medis masih kurang, kualitas dan kuantitas tenaga penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana masih kurang.

Peluang yang akan memungkinkan pembangunan kesehatan masyarakat adanya peraturan dan perundang-undangan tentang kesehatan memberikan jaminan keamanan kepada insan kesehatan dalam pelaksanaan berbagai program kesehatan, adanya perhatian pemerintah Daerah yang menetapkan sektor kesehatan sebagai salah satu sektor prioritas dalam strategi Tiga Batu Tungku (kesehatan rakyat, pendidikan rakyat, ekonomi rakyat) pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, tersedianya program kesehatan yang menjamin kemitraan/peran serta dengan lintas sektor, swasta, LSM, masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan, meningkatnya peran serta swasta, LSM dan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan. adanya bantuan luar negeri untuk program pelayanan kesehatan dan penanggulangan akibat bencana, meningkatnya dukungan dan komitmen politik pada setiap jenjang administrasi kesehatan di tingkat propinsi maupun kabupaten untuk menempatkan kesehatan

rakyat sebagai mainstream pembangunan kesehatan rakyat NTT, serta tersedianya sarana dan fasilitas kesehatan sampai ke desa dan adanya media informasi / media komunikasi serta iklim keterbukaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya.

2. ARAH PEMBANGUNAN

Pembangunan kesehatan diarahkan pada terwujudnya pemulihan, pemantapan dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya melalui peningkatan mutu kesehatan dengan agenda pokok :

1. Peningkatan kinerja institusi kesehatan, yang diarahkan pada upaya memelihara mutu lembaga pada institusi kesehatan kabupaten, kota dan unit pelayanan propinsi, baik milik pemerintah maupun swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan dan kemampuan menanggulangi berbagai masalah kesehatan.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan secara merata dan menjangkau seluruh masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengembangan penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana (KB), penyediaan obat yang terjangkau masyarakat, perlindungan terhadap populasi bahaya narkotika dan penyalahgunaan obat.
3. Peningkatan penyuluhan paradigma sehat, yang dirahkan pada upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia, pengawasan kesehatan lingkungan, obat, makanan dan minuman serta penyuluhan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas penduduk diarahkan pada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka

kematian, pencegahan penyakit menular, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan lingkungan dan perilaku hidup sehat.

3. PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

1. Program Penyediaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Tujuan Program : (1). Menyediakan dan menempatkan secara merata tenaga kesehatan yang mendukung berbagai jenis layanan kesehatan; (2). Meningkatkan mutu dan kinerja tenaga kesehatan dalam melaksanakan berbagai kegiatan layanan kesehatan.

Sasaran program : (1). Tersedianya data dan informasi tentang profil tenaga kesehatan; (2). Tersedianya tenaga dokter, para medis, bidan dan tenaga kesehatan terlatih sesuai kebutuhan; (3). Terwujudnya peningkatan mutu tenaga kesehatan dan mengurangi ketimpangan layanan kesehatan.

Kegiatan pokok : (1). Mengumpulkan data tentang jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ada; (2). Mengumpulkan data jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan; (3). Mengumpulkan data mutasi jenis tenaga kesehatan; (4). Melakukan pengolahan dan analisis data serta penyajian informasi tenaga kesehatan; (5). Merencanakan kebutuhan berbagai jenis tenaga kesehatan baru sesuai kebutuhan; (6). Melaksanakan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan; (10). Merencanakan peningkatan pendidikan formal dan berbagai jenis tenaga kesehatan; (11). Merencanakan pelatihan berbagai jenis tenaga kesehatan yang ada; (12). Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan, organisasi profesi kesehatan dan LSM yang ada; (7). Melaksanakan penerimaan dan pengangkatan tenaga kesehatan; (8). Mengatur penempatan jenis-jenis tenaga kesehatan strategis; (9). Merencanakan mutasi berbagai jenis tenaga kesehatan lintas kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan; (13). Menyusun standar penilaian tenaga kesehatan dan institusi pendidikan dan pelatihan; (14). Menilai prestasi berbagai tenaga kesehatan; (15). Menilai mutu sarana pendidikan dan pelatihan; (16). Merencanakan pola

pengembangan karier tenaga kesehatan. (6). Menyediakan beasiswa pendidikan melalui kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat secara ikatan dinas, (7). Meningkatkan status sarana/rumah kesehatan sehingga setiap rumah sakit/sarana kesehatan lainnya mendapatkan dokter ahli. (8). Meningkatkan mutu melalui dukungan informasi.

2. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

Tujuan program ini adalah (1). Mengembangkan kemitraan kerja antara unit organisasi layanan pemerintah dan non pemerintah. (2). Meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui bimbingan, penyuluhan dan pengendalian antara pemerintah dan masyarakat. (3). Meningkatkan pengawasan mutu lingkungan kesehatan. (4). Meningkatkan pengawasan air bersih, perumahan, bangunan sehat dan pembuangan limbah.

Sasaran program ini adalah (1). Tersedianya data dan informasi layanan kesehatan dalam bentuk profil kesehatan; (2). Terwujudnya kemitraan antara unit organisasi layanan kesehatan antara pemerintah dan masyarakat (3). Terwujudnya lingkungan kesehatan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan investasi pembangunan kesehatan, (4). Terwujudnya pengawasan terhadap mutu lingkungan, bahan-bahan konsumsi, produksi dan distribusinya.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Melaksanakan kemitraan kerja dan promosi kesehatan antara institusi pemerintah dan masyarakat, (2). Meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan JPKM; (3). Meningkatkan bimbingan dan pengendalian mutu layanan kesehatan; (4). Meningkatkan bimbingan, pengendalian dan pengawasan kualitas air, lingkungan, bahan-bahan konsumsi, peralatan dan obat terlarang lainnya; (5). Menyusun standar layanan kesehatan masyarakat di bidang ketatalaksanaan dan kelembagaan.

3. Program Peningkatan Mutu Layanan Medik.

Tujuan program ini adalah (1). Meningkatkan kinerja layanan medik pengobatan bagi masyarakat. (2). Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana layanan medik kesehatan bagi masyarakat.

Sasaran program ini adalah 1). Meningkatnya kemitraan antara unit organisasi layanan pemerintah dan non pemerintah dalam meningkatkan kinerja layanan medik pengobatan bagi masyarakat; 2). Meningkatnya mutu dan jumlah sarana dan prasarana mutu layanan medik; 3). Tersusunnya standar layanan medik, tata laksana perijinan dan akreditas sarana layanan medik.

Kegiatan pokok program ini adalah 1). Meningkatkan pola kemitraan bagi layanan medik perorangan, layanan dasar dan layanan rujukan; 2). Menyelenggarakan kemitraan layanan medik melalui penyedian obat, pengobatan tradisional, dan penyediaan alat kesehatan serta kedokteran; 3). Menyelegarkan kemitraan dalam layanan penunjang medik (laboratorium dan rontgen); 4). Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu dan layanan medik penyakit menular baik perorangan, kelompok maupun lembaga; 5). Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu layanan medik penyakit tidak menular, seperti : kecelakaan, degeneratif, dan kardiovaskuler; dan layanan medik rujukan; 6). Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu standar dan perijinan layanan medik seperti : obat, alat kesehatan dan kedokteran; 7). Melaksanakan bimbingan dan pengendalian mutu pununjang pengobatan (laboratorium, radiologi); 8). Menyusun standar layanan medik, tata laksana perijinan dan akreditas sarana layanan medik.

4. Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Kesehatan.

Tujuan program ini adalah 1). Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi tentang kakibat bencana/KLB yang dapat menimbulkan masalah kesehatan; 2). Meningkatkan bimbingan dan pengendalian penanggulangan masalah kesehatan dalam berbagai bentuk layanan kesehatan darurat; 3). Meningkatkan mutu pengorganisasian sumber daya dalam rangka penanggulangan

masalah kesehatan akibat bencana.

Sasaran program ini adalah 1). Tersedianya data dan informasi tentang masalah kesehatan akibat bencana dan KLB; 2). Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan penangulangan masalah kesehatan baik teknis organisasi maupun pengelolaannya.

Kegiatan pokok program ini adalah 1). Mengumpulkan data dan mengolah data dan informasi tentang KLB yang mengancam kesehatan; 2). Meneliti faktor penyebab KLB; 4). Membuat pemetaan daerah rawan bencana; 5). Mengumpulkan dan menganalisa data cakupan sarana air bersih di daerah rawan bencana; 6). Melaksanakan investigasi pencemaran dan keracunan untuk pengendalian dampak penting akibat bencana; 7). Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian dalam penangulangan masalah kesehatan dan pemulihan keadaan 8). Menyelenggarakan administrasi SDM yang dipersiapkan untuk mobilisasi PMKB, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PMKB serta menyelenggarakan pelatihan tenaga PMKB.

5. Program Penyuluhan Kesehatan dan Pengembangan Swadaya Masyarakat.

Tujuan program ini adalah (1). Memberdayakan perorangan, kelompok dan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya; (2). Meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan serta mengembangkan iklim yang mendukung, yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Sasaran program ini adalah (1). Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan profesional penyelenggaraan penyuluhan kesehatan masyarakat; (2). Meluasnya informasi kesehatan melalui berbagai media massa dan jalur informasi lainnya; (3). Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mebudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Menyebarluaskan informasi kesehatan melalui berbagai media massa; (2). Meningkatkan jaring kemitraan antara organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mebudayakan PHBS;

(3). Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mem- budayakan PHBS; (4). Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan tentang obat, makanan dan minuman, kosmetika, alat kesehatan, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya dalam rangka perlindungan kepada masyarakat; (5). Mendorong pengembangan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan; (6). Mengembangkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kegiatan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM).

6. Program Peningkatan Mutu Perencanaan Dan Penganggaran Kesehatan.

Tujuan program ini adalah (1). Menyediakan data dan informasi masalah kesehatan untuk mendukung perencanaan dan pembuatan kebijakan dalam mengelola berbagai program kesehatan; (2). Menyusun perencanaan berbagai program dan pembuatan kebijakan dalam mengelola berbagai program kesehatan; (3). Menyusun penganggaran berbagai program dalam mengelola berbagai program kesehatan.

Sasaran program ini adalah Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan berdasarkan data dan informasi yang akurat.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan; 2). Melakukan penelitian tentang program-program kesehatan; 3). Menyediakan data dan informasi tentang profil kesehatan tahunan. 4). Mengatur penyusunan rencana dan pembuatan kebijakan berbagai program kesehatan; 5). Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan sumber daya pendukung untuk pelaksanaan berbagai program kesehatan; 6). Melakukan pengendalian, pemantauan terhadap berbagai program pembangunan kesehatan.

II. PROGRAM PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH

Program penunjang pembangunan daerah sebagai bagian dari keseluruhan program pembangunan daerah tidak hanya merupakan kebersatuhan berbagai aktivitas pembangunan, tetapi merupakan upaya untuk mendefinisikan secara jelas problematik pembangunan di NTT dan menawarkan solusi yang benar-benar kontekstual. Program penunjang terdiri dari program-program bidang pembangunan : penataan ruang, Hukum dan HAM, Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan, Politik dan Otonomi Daerah, Agama, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang pada satu sisi harus diarahkan untuk menunjang program pokok dan pada sisi lain merupakan bidang pembangunan yang perlu didorong perkembangannya sebagai akibat dari penekanan pada pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan rakyat. Dengan demikian terdapat kausalitas antara program pokok dan penunjang.

1. Umum

Tuntutan reformasi pembangunan yang ditunjukkan dengan antara lain pemberian otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota telah membawa suasana dan babakan baru pembangunan. Pada satu sisi, pemberian otonomi luas telah mendorong perubahan paradigma pembangunan dan pada sisi lain terdapat kebutuhan yang semakin kuat untuk menjastifikasi pembangunan yang benar-benar kontekstual, komprehensif dan normatif. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pembangunan daerah sebagai suatu totalitas menuntut adanya perbaikan kinerja yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai potensi daerah yang menjadi **kekuatan** dan **peluang** dalam program penunjang pembangunan daerah, adalah sebagai berikut:

1. *Adanya perubahan paradigma pembangunan.* Perubahan paradigma pembangunan telah mendorong pemerintah melakukan berbagai perbaikan kinerja terutama yang berhubungan kualitas layanan publik. Pemerintah sudah tidak dapat memutuskan sendiri tentang berbagai hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan penguasaan sumber

daya alam secara sepihak, tetapi selalu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

2. *Kontrol sosial, pers dan proses demokratisasi yang makin baik.* Sistem pembangunan menuntut adanya manajemen pemerintahan yang menghendaki kontrol sosial sebagai kekuatan penyeimbang. Secara faktual diakui bahwa kontrol sosial seperti : laporan masyarakat, pemberitaan pers berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan manajemen pengelolaan pembangunan. Demikian pula proses demokratisasi yang ditunjukkan oleh *check and balances* juga telah mempengaruhi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan publik terutama yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat.
3. *Iklim kehidupan beragama yang kondusif.* Kehidupan beragama merupakan salah satu sendi kehidupan yang bersifat pribadi (*personalised*) yang perlu diekspresikan dalam satu tatanan kehidupan sosial. Oleh karena itu, perbedaan agama merupakan salah satu kekuatan pembangunan. Iklim kehidupan beragama yang kondusif merupakan suatu daya tarik bagi penciptaan iklim kehidupan lainnya.
4. *Desentralisasi kewenangan di daerah yang lebih besar.* Pemberian otonomi khususnya kewenangan pengaturan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota telah mendorong daya pikir, daya kerja pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan berbagai aktivitas pembangunan berdasarkan sumber daya lokal yang dimilikinya. Pencapaian pembangunan dari sasaran nasional di daerah secara bertahap bergeser menjadi pencapaian sasaran daerah di daerah yang selanjutnya melalui proses penggandaan akan mendorong pencapaian sasaran-sasaran nasional.
5. *Keragaman budaya dan etnis.* Kebersatuan dalam berbagai keragaman budaya, etnis telah mendorong segenap komponen masyarakat melakukan aktivitas pembangunan menurut standart nilai dan norma yang dianut oleh masing-masing kelompok budaya dan etnis. Kondisi ini ditunjukkan dengan

kurangnya konflik antar budaya, etnis, sehingga secara keseluruhan dapat menunjang pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Beberapa **kelemahan** dan **ancaman** dalam program penunjang pembangunan daerah, adalah :

1. *Pemanfaatan ruang yang tidak konsisten.* Ruang sebagai salah satu sumber daya pembangunan sesungguhnya merupakan suatu hal yang penting bagi pengaturan pembangunan. Penataan ruang sesuai peruntukannya (konsistensi) mencerminkan bahwa terdapat kebersatuan aktivitas antara manusia dan alam, lingkungan sebagai anugerah Tuhan. Ketidakkonsistenan penggunaan ruang mengakibatkan adanya gangguan terhadap aktivitas manusia, al hasil mengurangi tingkat produksi dan produktivitas manusia dan masyarakat.
2. *Kualitas SDM yang relatif rendah.* Tidak dapat disangkal bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi motor penggerak pembangunan. Pembangunan yang tidak dimotori oleh manusia yang memiliki kemampuan handal akan mengakibatkan salah urus pembangunan sehingga deviasi pencapaian pembangunannya pun sebagai faktor ikutannya selalu terjadi. Kondisi ini sejauh dapat diminimalisir melalui *the right men in the right place* dalam keseluruhan tatanan kelembagaan pemerintahan.
3. *Timpangnya pemerataan menikmati hasil-hasil pembangunan.* Secara faktual diakui bahwa, di perkotaan lebih banyak penduduk yang menikmati hasil-hasil pembangunan sehingga merangsang arus urbanisasi dan kondisi ini telah menjadi beban pembangunan bagi pemerintah. Timpangnya pembangunan selain disebabkan oleh perbedaan pendapatan masyarakat kota dan desa, juga disebabkan oleh curahan investasi lebih banyak diterima oleh masyarakat kota sehingga mempengaruhi kinerja di antara kedua masyarakat tersebut.

4. *Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.* Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai aktivitas pembangunan baik sebagai kelompok pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan maupun sebagai kelompok yang mengkritisi pengelolaan pembangunan akan mendorong terciptanya olah pikir, olah kerja dan olah kreasi manusia sehingga nantinya dapat disumbangkan bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan.
5. *Lemahnya penegakan hukum dan HAM.* Hal ini berpengaruh pada pola kehidupan manusia yang menghendaki adanya kondisi keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penegakan hak-hak asasi manusia perlu diperjuangkan secara terus menerus, sehingga masyarakat dapat memperoleh rasa aman, nyaman dan tenram. Lemahnya penegakan hukum dan HAM juga mempengaruhi terciptanya iklim politik yang tidak/kurang kondusif dan sebagai potensi konflik baik horisontal maupun vertikal. Kedua hal tersebut di atas merupakan faktor penting dalam proses peningkatan produksi dan proktivitas masyarakat.

2. Arah Pembangunan

Arah pembangunan dalam program penunjang pembangunan daerah tahun 2001 – 2004 adalah :

1. Terwujudnya struktur tata ruang wilayah propinsi yang terintegrasi dalam kebersatuhan daerah propinsi NTT guna menumbuhkan interaksi antara ruang dan aktivitas pembangunan.
2. Terwujudnya kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia bagi penciptaan keseimbangan lingkungan alam, buatan dan sosial serta jasmani dan rohani.
3. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat terutama peran perempuan (jender) dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

4. Terwujudnya suasana aman, tenang dan tertib yang didukung oleh ketersediaan materi, perangkat dan aparat penegak hukum yang bersih, berwibawa dan bebas KKN.
5. Terwujudnya kesamaan pandang tentang pelaksanaan sistem pemerintahan, politik dan otonomi daerah sehingga dapat peningkatan layanan publik serta mendorong perbaikan kinerja pembangunan.

3. Program Pembangunan

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka disusun program-program penunjang dalam program pembangunan daerah propinsi NTT tahun 2001-2004, sebagai berikut:

1. Tata Ruang

1.1. Program Pembangunan Tata Ruang

Tujuan program ini adalah Mengembangkan sistem penataan ruang

Sasaran program ini adalah (1). Tersedianya rencana tata ruang wilayah propinsi; (2) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan tata ruang yang optimal dan berkualitas; (3) Terlaksananya pengendalian, pengawasan pemanfaatan tata ruang; (4) Tersedianya aparatur pengelola tata ruang yang berkualitas.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan kualitas rencana tata ruang.; (2) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; (3) peningkatan peran serta masyarakat; (4) mensosialisasikan perangkat perundang-undangan; (5) meningkatkan kemampuan kelembaga an; (6) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang; (7) Membuat peta zonasi laut.

2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

2.1. Kependudukan

2.1.1. Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

Tujuan program ini adalah 1). Meningkatkan kualitas dan pengendalian kuantitas penduduk; 2). Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta membudayakan NKBS (Norma Keluarga Bahagia dan Sejahtera).

Sasaran program ini adalah 1) Menurunnya angka kelahiran dan kematian; 2) Meningkatnya peran perempuan dalam keluarga; 3) Membudayanya NKBS.

Kegiatan pokok ini adalah 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, 2) Menggalakkan gerakan KB yang mandiri dan berkualitas, pembudayaan usia kawin yang ideal, penjarangan kelahiran, penundaan kelahiran anak pertama, promosi, penyuluhan pendidikan, penggalangan kemitraan dan pebudayaan NKBS; 3) Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) keluarga; 4) Melaksanakan sosialisasi pengarusutamaan jender (PUJ).

2.1.2. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Tujuan program ini adalah Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan.

Sasaran program ini adalah 1) Meningkatnya pengembangan administrasi kependudukan yang berfungsi sebagai bank data kependudukan; 2) Meningkatnya kemampuan aparatur pengelola data kependudukan; 3) Meningkatnya kemampuan kelembagaan penyajian data dan informasi.

Kegiatan pokok program ini adalah 1) Mengkaji dan mengembangkan administrasi kependudukan; 2) Menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat; 3) Melakukan pendidikan dan pelatihan administrasi kependudukan; 4) Meningkatkan hubungan kerja sama antar instansi terkait dibidang kependudukan.

2.2. Pemuda dan Olah Raga.

2.2.1. Program Pembinaan dan Keserasian Kepemudaan

Tujuan program ini adalah Mewujudkan keserasian pembinaan pemuda di berbagai bidang pembangunan.

Sasaran program ini adalah (1) Terwujudnya pola pembinaan kepemudaan yang serasi diberbagai bidang pembangunan; (2) Meningkatnya aktifitas pemuda sesuai profesi dan fungsinya dalam pembangunan.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) melakukan evaluasi pola pembinaan kepemudaan; (2) melakukan KIE dan advokasi kepemudaan; (3) mengintegrasikan pola pembinaan kepemudaan secara terpadu (4) melakukan intensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan masalah-masalah kepemudaan termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya.

2.2.2. Program Peningkatan Partisipasi Pemuda

Tujuan program ini adalah Memberi kesempatan yang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya.

Sasaran program ini adalah 1) meningkatnya partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; 2) terbentuknya regulasi dan suasana yang kondusif yang menjamin kebebasan pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggung jawab, 3) meningkatnya jumlah wirausahawan muda, 4) menurunnya jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda serta meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba, 5) menurunnya angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.

Kegiatan pokok ini adalah 1). Menumbuhkembangkan kewirausahaan generasi muda; 2). Menciptakan iklim usaha yang kondusif; 3) Meningkatkan kualitas, kompetensi, kemandirian, dan profesionalisme pengusaha kecil, menengah, koperasi pemuda, agar lebih kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing, 4) Meningkatkan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja pemuda yang diarahkan bagi peningkatan kompetensi, kemandirian dan profesionalisme; 5) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemuda tentang manfaat penggunaan iptek; 7) meningkatkan partisipasi dan kedulian pemuda dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kesinambungan pembangunan; 8). Memperluas kesempatan dalam berorganisasi dan berkreasi bagi pemuda secara bebas dan bertanggung jawab; 9) meningkatkan apresiasi seni dan budaya daerah dan budaya bangsa dikalangan pemuda sebagai media persahabatan antar daerah dan antar negara;

10) meningkatkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial di kalangan pemuda; 11) mencegah berbagai pengaruh negatif budaya asing di kalangan pemuda dalam rangka memperkuat ketahanan budaya nasional; 12) meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan untuk memperkuat pembangunan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap menghargai kemajemukan, 13) meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda, 14) meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan kriminalitas termasuk tawuran di kalangan pelajar dan pemuda, 15) memberikan pemahaman, penanaman nilai-nilai, dan penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi pemuda, 17) meningkatkan jaringan kerja sama kepemudaan antar daerah, 18). Meningkatkan keadilan dan kesetaraan jender dalam bidang kepemudaan.

2.2.3. Program Pengembangan dan Pembinaan Keserasian Olaraga

Tujuan program ini adalah 1) mewujudkan keserasian pembinaan olahraga diberbagai bidang pembangunan; 2) Mewujudkan paradigma sehat melalui peningakatan jasmani masyarakat.

Sasaran program ini adalah 1) Terwujudnya pola pembinaan dan pengembangan keolahragaan; 2). meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat; 3). meningkatnya perkembangan olah raga masyarakat, khususnya bagi penyandang cacat, lanjut usia dan olah raga tradisionil; 4). meningkatnya jumlah dan bibit olah ragawan berbakat; 5). meningkatnya prestasi oleh ragawan di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1) melakukan evaluasi pola pemmbinaan keolahragaan; 2) menggali prestasi atlet unggulan; 3) mengembangkan olah raga usia dini; 4) mengembangkan pendidikan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi; 5) mengembangkan pendidikan jasmani di tempat kerja; 6) mengembangkan olah raga rekreasi, olah raga lanjut usia, olah raga

penyandang cacat dan olah raga tradisionil; 7) meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan sarana dan prasarana olah raga; 8) melakukan identifikasi bakat dan potensi keolahragaan; 9) melakukan pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas; 10) melakukan pendidikan, pelatihan dan pemagangan bagi pelatih dan wasit; 11) menyelenggarakan kompetisi olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat; 12) memberikan penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan prestasi; 13) melakukan pembinaan organisasi olahraga termasuk sanggar-sanggar senam; 14) melakukan pembinaan cabang olahraga prioritas; 15) menyelenggarakan kompetisi olahraga wilayah kepulauan; 16) menerapkan dan memanfaatkan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga.

2.3. Kebudayaan/Kesenian

2.3.1. Program Pengembangan Kebudayaan/kesenian

Tujuan Program ini adalah Menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah/ budaya lokal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa.

Sasaran program ini adalah 1) berkembangnya sistem nilai budaya lokal/daerah yang diperkaya oleh budaya baru yang serasi, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama; 2) terwujudnya pemahaman dan apresiasi masyarakat pada budaya-budaya lokal; 3) berkembangnya kebebasan berkreasi dalam berkesenian, 4) meningkatnya jumlah sanggar-sanggar seni daerah; 5) terdokumentasinya warisan budaya dan kesenian daerah/lokal.

Kegiatan pokok program ini adalah 1) meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan tradisi dan peninggalan sejarah; 2) menciptakan ilkim yang kondusif bagi timbulnya kreasi sastra, seni, dan budaya, 3) membina dan mengembangkan kesenian tradisional; 4) meningkatkan jumlah sanggar seni budaya; 5) memperjuangkan pembakuan hak cipta hasil seni budaya lokal/daerah; 6).Meningkatkan peran permuseuman sebagai wadah dokumentasi warisan seni budaya lokal.

2.4. Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Jender (KKJ).

2.4.1. Program Pemberdayaan Perempuan , Kesetaraan dan Keadilan Jender (KKJ)

Tujuan program ini adalah 1) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, 2) Memperjuangkan KKJ serta kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan, 3) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan, 4). Memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan .

Sasaran program ini adalah 1) Terselenggaranya pengarusutamaan jender pada semua bidang pembangunan, 2) menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan 3) meningkatnya kualitas hidup perempuan, 4). Meningkatnya penegakan hukum dan HAM atas setiap aksi kekerasan terhadap perempuan secara konsisten dan konsekuensi.

Kegiatan pokok program ini adalah 1) Menciptakan peraturan yang menunjang proses pemberdayaan perempuan; 2) Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja yang berbasis jender; 3). Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja perempuan melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah; 4). Meningkatkan perlindungan tenaga kerja perempuan; 5) mendorong terbentuknya lembaga perjuangan hak-hak perempuan; 6). Meningkatkan perlakuan yang adil terhadap perempuan dalam keluarga; 7). Membina nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan.

2.5. Kesejahteraan Sosial

2.5.1. Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tujuan program ini adalah membangun ketahanan sosial yang dapat menopang pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial/kemasyarakatan seperti korban bencana alam/KLB, pengungsian dan gejala malnutrisi serta menurunnya kualitas generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial/kemasyarakatan, fakir miskin, anak terlantar dan kenakalan remaja.

Sasaran program ini adalah 1). Terbinanya kesejahteraan sosial; 2). Terbinanya pengembangan aktivitas kepemudaan; 3) Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi sosial; 4). Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan; 5) Terkordinasinya upaya penanggulangan bencana alam.

Kegiatan pokok program ini adalah 1). Meningkatkan upaya penanggulangan penyandang masalah sosial; 2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelayanan masalah-masalah sosial; 3). Mengembangkan dan menserasikan pola pembinaan dalam penanganan masalah-masalah sosial; 4) Mengembangkan sistem informasi terpadu terhadap masalah-masalah sosial; 5). Meningkatkan peranserta dunia usaha dalam penanggulangan masalah sosial; 6). Meningkatkan kemandirian penyandang masalah sosial melalui pelatihan dan pemagangan.

2.6. Tenaga Kerja

2.6.1. Program Pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Tujuan Program ini adalah 1) Meningkatkan ketampilan tenaga kerja; 2). Mewujudkan iklim kerja yang menjamin perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja; 3). Mengendalikan persebaran dan mobilitas penduduk, 4). Menciptakan kawasan transmigrasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang layak huni, layak usaha dan layak lingkungan alam maupun sosial.

Sasaran program ini adalah (1). Menurunnya tingkat pengangguran; (2). Terwujudnya suasana kerja yang menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta meningkatnya produktivitas tenaga kerja; 3). Terwujudnya persebaran dan mobilitas penduduk pada lahan potensial; 4). Terwujudnya pola pemukiman yang layak huni; 5). Terjalinnya program kerja AKAD dan AKAN.

Kegiatan pokok program ini adalah (1). Mendayagunakan bursa tenaga kerja (2). Menyempurnakan mekanisme pengadaan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri; 3). Memberdayakan tenaga kerja penyandang cacat sesuai

keterampilan yang dimiliki; 4). Menumbuhkembangkan lembaga/badan pendidikan dan pelatihan profesi; 5). Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; 6). Mengembangkan sistem hubungan industrial Pancasila; 7). Meningkatkan kemampuan kelembagaan ketenagakerjaan; 8). Melakukan pengawasan terhadap hak-hak dasar pekerja antara lain meliputi pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, pekerja anak, waktu kerja dan waktu istirahat; 9). Meningkatkan perlindungan tenaga kerja wanita terutama melalui penyuluhan dan pelatihan agar tidak terjadi diskriminasi dan marjinalisasi; 10). Melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa asuransi sosial; 11). Melakukan sosialisasi tentang tujuan transmigrasi; 12). Menginventarisasi calon lokasi transmigrasi yang layak huni; 13). Mengembangkan lokasi transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya; 14). Menyediakan sarana dan prasarana usaha bagi keluarga miskin.

3. PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM

Pembangunan Hukum dan HAM meliputi 6 aspek yaitu; materi hukum, aparatur hukum, kelembagaan hukum, sarana dan prasarana hukum, partisipasi masyarakat dan Hak Asasi Manusia. Program-program pembangunan Hukum dan HAM adalah :

3.1. Program Penegakan Hukum Dan HAM.

Tujuan program ini adalah : (1). Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, (2). Mewujudkan ketertiban, keamanan dalam masyarakat. (3). Mewujudkan hak-hak azasi manusia.

Sasaran program ini adalah (a). Terwujudnya rasa aman dan keadilan dalam masyarakat, (b). Terciptanya kondisi masyarakat yang tertib, teratur dan aman, (c). Terwujudnya penegakan aturan-aturan hukum yang menjamin penegakan hak-hak asasi manusia, (d). Terciptanya aparatur dan sistem hukum yang menjamin, (e). Mengembangkan produk hukum yang transparan dan responsif.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1) mengembangkan produk-produk hukum yang transparan dan responsif; 2) meningkatkan jumlah dan mutu aparatur hukum; 3) meningkatkan kemampuan kelembagaan hukum; 4) pengembangan sarana dan prasarana hukum; 5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum; 6) meningkatkan perlindungan hukum dan HAM; 7) sosialisasi produk-produk hukum dan meningkatkan kesadaran hukum dan HAM dalam masyarakat.

4. POLITIK, PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

4.1. Politik

4.1.1. Program Pembangunan Politik.

Tujuan program ini adalah 1). Memantapkan pengembangan sistem politik secara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam wadah NKRI;

Sasaran program ini adalah 1). Mantapnya eksistensi NKRI di wilayah Nusa Tenggara Timur; 2). Berkembangnya sistem komunikasi dan informasi melalui media massa; 3). Terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan Parpol di Daerah;

Program pokok program ini adalah 1). Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi dan informasi melalui media massa; 2). Menumbuhkembangkan budaya politik demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; 3). Mendorong keberadaan masyarakat madani (civil society); 4). Meningkatkan komunikasi politik antara lembaga eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam semangat kemitraan; 5). Menciptakan iklim yang kondusif bagi kemandirian parpol dalam semangat NKRI; 6). Mendukung sepenuhnya penyelenggraan Pemilu Tahun 2004.

4.2. Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah

4.2.1. Program Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah

Tujuan Program ini adalah membentuk profil aparatur pemerintah daerah yang professional, bersih dan berwibawa dalam membangun pemerintahan yang

baik (*good governance*).

Sasaran program ini adalah (1) Meningkatnya kemampuan dan keahlian serta ketrampilan manajerial; (2) Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan (mental) aparatur; (3) Meningkatnya dedikasi dan loyalitas (disiplin) aparatur; (4) Meningkatnya kesejahteraan aparatur.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem manajemen pemerintahan; (2) Meningkatkan pembinaan mental dan keimanan; (3) Memperluas kesempatan studi lanjut bagi aparatur pemerintah; (4) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia (HAM); (5) Meningkatkan pelatihan teknis fungsional dan struktural; (6) Meningkatkan penyediaan sarana dan fasilitas kerja.

4.3. Pembangunan Bidang Administrasi Publik.

4.3.1. Program Pembangunan Bidang Administrasi Publik

Tujuan Program ini adalah 1). mewujudkan sistem administrasi publik yang efisien dan efektif dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada publik.

Sasaran program ini adalah (1) Terwujudnya sistem administrasi publik yang efisien dan efektif; (2) Terwujudnya pengembangan institusi administrasi publik; (3) Meningkatnya kapasitas kerja administrasi publik; (4) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian administrasi;

Kegiatan pokok program ini adalah 1). Mengembangkan sistem informasi manajemen daerah yang mendukung aktivitas administrasi publik; 2) Meningkatkan pembinaan komunikasi administrasi yang intensif dengan berbagai komponen masyarakat; 3) Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi administrasi publik; 4). Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi kepegawaian, baik tahap rekrutmen, penempatan, promosi, maupun purna tugas; 5). Meningkatkan Pengawasan dan pengendalian administrasi publik.

4.4. Otonomi Daerah

4.4.1. Program Pembangunan Otonomi Daerah

Tujuan Program ini adalah Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sasaran Program ini adalah (1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; (2) Meningkatnya kinerja lembaga eksekutif dan legislatif secara mandiri; (3) Meningkatnya semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif; (4) Meningkatnya kesadaran kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam bingkai NKRI; (5) Terciptanya dukungan seluruh komponen masyarakat terhadap otonomi daerah; (6) Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Kegiatan pokok ini adalah 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah dalam bingkai NKRI; 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; 3) Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran; 4) Meningkatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat; 5). Mengantisipasi pemekaran wilayah pemerintahan.

4.5. Pembangunan Perdesaan

4.5.1. Program Pembangunan Perdesaan

Tujuan Program ini adalah 1). Meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan; 2). Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan perdesaan.

✓ Sasaran Program ini adalah 1). Meningkatnya kemampuan managemen pembangunan desa; 2). Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia masyarakat desa; 3). Terbentuknya Badan Perwakilan Desa; 4). Tersedianya data dan profil desa yang akurat; 5). Terbangunnya kemitraan antara pemerintah, LSM dan masyarakat desa; 6). Meningkatnya sarana dan prasarana pembangunan pedesaan.

Kegiatan Pokok program ini adalah 1). Meningkatkan managemen pembangunan desa pada 14 UDKP Model; 2). Meningkatkan peran Badan Perwakilan Desa; 3). Meningkatkan kemampuan kelembagaan desa/kelurahan; 4). Melaksanakan Peningkatan Pekerja Anak di Desa Tertinggal (P2ADT); 5). Melaksanakan lomba desa; 6). Melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga; 7). Melaksanakan revitalisasi Posyandu; 8). Melaksanakan program PMTAS; 9). Melaksanakan pemanfaatan perpustakaan desa; 10. Meningkatkan kerjasama antara LSM dan kelompok Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP); 11). Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pembangunan desa; 12). Memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut; 13). Menyediakan data profil desa yang akurat.

4.6. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

4.6.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Tujuan Program ini adalah Mengentaskan kelompok masyarakat miskin.

Sasaran Program ini adalah 1). Meningkatnya pendapatan penduduk miskin; 2). Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin; 3). Tersedianya fasilitas pendampingan bagi masyarakat miskin (Kader/fasilitator dan atau LSM).

\ Kegiatan Pokok program ini adalah 1). Menyediakan bantuan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan; 2). Menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau; 3). Mengupayakan pelayanan bantuan paket ekonomi produktif; 4). Melaksanakan pendampingan kelompok masyarakat secara berkelanjutan; 5). Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; 6). Memberdayakan perempuan melalui penguatan ekonomi lokal; 7). Mendorong partisipasi dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan.

4.7. Pengembangan Wilayah

4.7.1. Program Pengembangan Wilayah

Tujuan Program ini adalah 1). Memacu pertumbuhan daerah melalui percepatan pertumbuhan sosial ekonomi wilayah; 2). Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah; 3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 4). Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Sasaran Program ini adalah 1). Meningkatnya kapasitas daerah melalui koordinasi pengelolaan pembangunan; 2). Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah berwawasan lingkungan; 3). Terwujudnya percepatan pertumbuhan sosial ekonomi daerah; 4). Mantapnya koordinasi pengelolaan kawasan prioritas yang meliputi kawasan khusus, kawasan kritis minus dan kawasan tertinggal.

Kegiatan Pokok program ini adalah 1). Meningkatkan mutu aparatur pemerintah melalui pelatihan, pemagangan dan studi lanjut; 2). Melakukan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan lembaga sosial lainnya dalam rangka pemantapan kerjasama kelompok serta kegiatan usaha sektor riil masyarakat; 3). Membuka isolasi fisik wilayah melalui pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana transportasi); 4). Mengembangkan akses pasar dan pemantapan pasar lokal; 5). Memanfaatkan lahan tidur melalui ekstensifikasi dan Intensifikasi lahan; 6). Mengamankan sumber air dan penyediaan air bersih; 7). Meningkatkan penggalangan kerjasama kemitraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Negara, Donor, Dunia Usaha dan masyarakat; 8). Mengembangkan dan pemeliharaan kawasan pariwisata (alam dan budaya); 9). Melakukan pelatihan bagi masyarakat sesuai dengan basis usahanya dan potensi pengembangan wilayah; 10). Memantapkan penyusunan rencana pembangunan wilayah secara profesional; 11). Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan kawasan pengembangan; 12). Menyusun data base kawasan pengembangan; 13). Melaksanakan sosialisasi tentang pengembangan wilayah sebagai model pendekatan pembangunan daerah.

5. PEMBANGUNAN AGAMA

5.1. Program Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Bergama

Tujuan Program ini adalah Merciptakan suasana kehidupan keagamaan di NTT yang kondusif melalui upaya pendalaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama demi terlaksananya kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

Sasaran program ini adalah 1) meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat; 2) meningkatnya dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antar umat beragama; dan 3) meningkatnya toleransi umat beragama dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat dan persatuan bangsa.

Kegiatan pokok program ini adalah 1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama antara lain melalui perlombaan pembacaan Alkitab dan paduan suara gerejawi serta MTQ, Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), mimbar agama di Radio dan TV serta media lainnya; 2) Meningkatkan peran forum komunikasi antara tokoh umat beragama; 3). Meningkatkan toleransi antar umat beragama.

5.2. Program Pembinaan Pendidikan Agama

Tujuan program ini adalah Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan ajaran agama bagi siswa dan mahasiswa.

Sasaran program ini adalah 1). meningkatnya landasan etika dan moral bagi siswa dan mahasiswa; 2). menurunnya tindakan asusila yang dilakukan oleh siswa dan mahasiswa antara lain terhadap penggunaan obat-obatan terlarang; 3). meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan agama.

Kegiatan pokok ini adalah 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan agama; 2) meningkatkan jumlah dan mutu tenaga pengajar/guru pendidikan agama; 3) meningkatkan pendidikan agama di lingkungan perguruan tinggi; 4). menyiapkan kurikulum pendidikan agama bagi siswa dan mahasiswa; 5) melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan keagamaan di

lingkungan keluarga.

5.3. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Tujuan program ini adalah menata sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah.

Sasaran program ini adalah 1). meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah; 2) meningkatnya partisipasi

1) menciptakan kemandirian seperti Pemuda GMII, GMII, Pemuda Katholik, PMKRI, Peradah, Pemuda Mesjid, HMI dan lainnya; 2) memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana keagamaan untuk kegiatan ibadah; 3) meningkatkan rasa solidaritas dan persatuan antara umat beragama;

lingkungan keluarga.

5.3. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Tujuan program ini adalah menata sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah.

Sasaran program ini adalah 1). meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah; 2) meningkatnya partisipasi umat dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Kegiatan pokok ini adalah 1) memberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan; 2) memberikan pelayanan kepada umat nasrani menjalankan kegiatan keagamaan antara lain Pesparawi dan siarah iman; 3) menyediakan sarana dan prasarana lembaga keagamaan; 4) meningkatkan pelayanan haji dan umroh, 5) Meningkatkan peran dunia usaha dalam kehidupan keagamaan.

5.4. Program Pembinaan Kelembagaan Sosial Umat Beragama

Tujuan Program ini adalah 1). Meningkatkan peran dan kemampuan lembaga-lembaga sosial umat beragama; 2). Meningkatkan partisipasi umat dalam pelaksanaan kegiatan sosial umat beragama.

Sasaran program ini adalah 1). berfungsinya lembaga sosial umat beragama secara proposional dan bertanggugjawab. 2) terbinanya kemitraan dan kolaborasi yang harmonis antar lembaga sosial umat beragama.

Kegiatan pokok program ini adalah 1) Memberdayakan lembaga sosial umat beragama dalam rangka menciptakan kemandirian seperti Pemuda GMIT, GMKI, Pemuda Katholik, PMKRI, Peradah, Pemuda Mesjid, HMI dan lainnya; 2) memberikan bantuan sarana dan prasarana lembaga sosial keagamaan; 3) meningkatkan mutu SDM lembaga sosial umat beragama;

6. PEMBANGUNAN KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

6.1. Program peningkatan dan pemantapan sistem keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Tujuan program ini adalah : 1) membangun sistem keamanan swakarsa yang berbasis masyarakat; 2) mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kondisi aman dan tertib.

Sasaran program ini adalah : 1) terwujudnya suasana rasa aman tenram dalam kehidupan masyarakat; 2) terbinanya kemitraan yang harmonis antara masyarakat dan aparat keamanan.

Kegiatan pokok program ini adalah : 1). Meningkatkan partisipasi dan peran seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban yang kondusif; 2) Mendorong dan mendukung terbangunnya sistem keamanan & ketertiban terutama di daerah perbatasan dengan Timor Timur dan kawasan lainnya; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban baik didalam daerah maupun di kawasan perbatasan antara lain Timor Timur dan Australia; 4) meningkatkan mutu SDM dibidang, keamanan, ketenteraman dan ketertiban; 5) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban; 6) meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan aparatur keamanan (TNI dan POLRI).

BAB IV **PENUTUP**

Naskah Program Pembangunan Daerah (Propeda) 2001-2004 ini merupakan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda).

Propeda dalam pelaksanaannya akan dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Daerah yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terukur kinerjanya yang akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Propeda menurut sifatnya mencakup program-program pembangunan yang berskala regional, lintas wilayah, dan lintas daerah, yang oleh karena sifat dan cakupannya harus dilakukan dengan pertimbangan kondisi daerah. Propeda harus menjadi acuan bagi lembaga-lembaga Daerah, Lembaga-lembaga dekonsentrasi dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen di Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) serta bagi pemerintah daerah dalam menyusun Program Pembangunan Tahunan Daerah yang karena keragamannya harus mampu mengakomodasikan aspirasi dan kekhususan daerah dalam kerangka pembangunan daerah.

Demi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan desentralisasi pembangunan, konsistensi perencanaan dan penyusunan program pembangunan secara vertikal antara Propeda di Propinsi dan Propeda di tingkat kabupaten/kota harus didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga Daerah bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara Propeda dan Repeta melalui proses perencanaan pembangunan dan anggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh, bertanggung-gugat dan terkendali pelaksanaannya, lembaga/badan perencanaan pembangunan daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Koordinasi perencanaan daerah serta antara perencanaan daerah dan kabupaten/kota dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan,

anggaran, serta pemantuan dan evaluasi kinerja pelaksanaan yang terintegrasi, menyeluruh, interaktif lintas pelaku, transparan, dan bertanggung-gugat. Hasil perencanaan pembangunan dan anggaran yang diperoleh dari proses ini akan menjadi bahan Pemerintah dalam pembahasan dan penetapan Repeta yang memuat APBD bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahunnya.

Pemerintah dan lembaga-lembaga Daerah lainnya serta masyarakat harus bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Propeda ini dan pada tahap awal memusatkan pada upaya pemulihan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakkan supremasi hukum, pemulihan ekonomi yang mengutamakan penataan infrastruktur perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan cadangan tabungan daerah, pengembangan sumberdaya manusia, dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta penataan lembaga-lembaga pemerintah agar terselenggara fungsi pelayanan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna.

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

